

LAPORAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL
TENAGA KESEHATAN

TAHUN 2023

AUDITED



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kesehatan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut, diharapkan dapat berguna kepada para pengguna Laporan Keuangan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara pada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

15 Mei 2024

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan,



drg. Arianti Anaya, MKM

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Diagram	vii
Daftar Grafik	viii
Daftar Lampiran	ix
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Surat Representasi Manajemen	
Ringkasan Laporan Keuangan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	40
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	62
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	102
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	120
F. Pengungkapan Penting Lainnya	132
Lampiran	

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1	Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 dan 2022	3
Tabel 2	Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	3
Tabel 3	Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1	28
Tabel 4	Daftar Satuan Kerja Politeknik Kesehatan	29
Tabel 5	Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih	33
Tabel 6	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	37
Tabel 7	Perubahan Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Setelah Revisi	40
Tabel 8	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2023	41
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022	42
Tabel 10	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023	44
Tabel 11	Perbandingan Anggaran Belanja TA 2023 dan 2022	45
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022	47
Tabel 13	Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022	49
Tabel 14	Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022	50
Tabel 15	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja COVID-19 TA. 2023	51
Tabel 16	Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022	52
Tabel 17	Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022	53
Tabel 18	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022	54
Tabel 19	Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022	55
Tabel 20	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan 2022	57
Tabel 21	Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan 2022	58
Tabel 22	Realisasi Belanja Modal BLU TA 2023 dan 2022	59
Tabel 23	Capaian Output Prioritas Nasional TA 2023 dan 2022	61
Tabel 24	Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022	63

Tabel 25	Perbandingan Kas pada Badan Layanan Umum TA 2023 dan 2022	65
Tabel 26	Rincian Kas dan Bank Badan Layanan Umum per Satker	66
Tabel 27	Rincian Daftar PPO per Satker	67
Tabel 28	Rincian Setara Kas Lainnya BLU per Satker TA 2023 dan 2022	67
Tabel 29	Rincian Investasi Jangka Pendek BLU per Satker	68
Tabel 30	Perbandingan Belanja Dibayar Di Muka TA 2023 dan TA 2022	69
Tabel 31	Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Satker	70
Tabel 32	Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2023 dan 2022	72
Tabel 33	Rincian Piutang Lainnya per Satker	72
Tabel 34	Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022	73
Tabel 35	Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	74
Tabel 36	Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Satker	75
Tabel 37	Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU TA 2023 dan 2022	75
Tabel 38	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar	77
Tabel 39	Perbandingan Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022	78
Tabel 40	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	85
Tabel 41	Rincian Tagihan TP / TGR	86
Tabel 42	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2023	87
Tabel 43	Rincian Aset Tak Berwujud TA 2023 dan 2022	87
Tabel 44	Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per Satker per 31 Desember 2023	89
Tabel 45	Rincian Aset Lain-lain TA 2023 dan 2022	90
Tabel 46	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	92
Tabel 47	Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga TA 2023 dan 2022	93
Tabel 48	Perbandingan Belanja Pegawai yang Masih Harus	94

	Dibayar	
Tabel 49	Perbandingan Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	95
Tabel 50	Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga BLU	96
Tabel 51	Perbandingan Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU	98
Tabel 52	Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023	99
Tabel 53	Rincian Pendapatan Sewa Diterima Di Muka per Satker	100
Tabel 54	Rincian Pendapatan Diterima di Muka BLU per Satker	100
Tabel 55	Perbandingan Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022	101
Tabel 56	Rincian Pendapatan TA 2023 dan 2022	102
Tabel 57	Rincian Pendapatan Hibah BLU TA 2023	104
Tabel 58	Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022	105
Tabel 59	Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022	108
Tabel 60	Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022	109
Tabel 61	Rincian Beban Pemeliharaan	111
Tabel 62	Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022	112
Tabel 63	Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2023 dan 2022	113
Tabel 64	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022	115
Tabel 65	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2023 dan 2022	116
Tabel 66	Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022	117
Tabel 67	Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022	117
Tabel 68	Rincian Beban Pelepasan Aset	118
Tabel 69	Rincian Surplus/Defisit Laporan Operasional TA 2023 dan 2022	119
Tabel 70	Rincian Koreksi Atas Reklasifikasi TA 2023 Per Satker	121
Tabel 71	Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi TA 2023 Per Satker	122
Tabel 72	Rincian Transaksi Lain-Lain TA 2023	124

Tabel 73	Rincian Lain-Lain TA 2023 Berdasarkan Satuan Kerja	126
Tabel 74	Rincian Transaksi Antar Entitas TA 2023	127
Tabel 75	Rincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar TA 2023	128
Tabel 76	Rincian Pengesahan Hibah Langsung TA 2023	130
Tabel 77	Rincian Alokasi dan Realisasi Rupiah Murni Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan atas Kegiatan Boundaries Program/ <i>Project I-SPHERE</i> Tahun 2023	134
Tabel 78	Alokasi Realisasi Program Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> per Jenis Intervensi di Tingkat Rincian Output Tahun 2023	136
Tabel 79	Alokasi Realisasi Program Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> per Jenis Intervensi Analisis Lanjutan Tahun 2023	136
Tabel 80	Rincian Nilai Aset Satker Dekonsentrasi yang di Likuidasi Tahun 2023	138
Tabel 81	Rincian Penetapan Satker Poltekkes BLU Tahun 2023	139
Tabel 82	Rincian Anggaran dan Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan Tahun 2023	140
Tabel 83	Rincian Nilai Usulan Tunggakan Insentif Tahun 2022 yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2022	141
Tabel 84	Tahap Verifikasi Tunggakan Insentif Tahun 2022 oleh BPKP	142
Tabel 85	Tahap Pembayaran Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan Tahun 2022	142
Tabel 86	Rincian Penyajian Tunggakan Insentif TA 2022	143
Tabel 87	Rincian Nilai Temuan pada Universitas	143
Tabel 88	Identifikasi <i>To Do List</i> Tahun 2023	144
Tabel 89	Selisih Rekonsiliasi Internal	146
Tabel 90	Daftar Bangunan Gedung sebagai Underlying Asset dalam Penerbitan SBSN	150
Tabel 91	Daftar Tanah sebagai Underlying Asset dalam Penerbitan SBSN	150

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Komposisi Anggaran Tahun 2023	45
-----------	-------------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023	46
----------	---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Neraca
Lampiran 2	Laporan Operasional
Lampiran 3	Laporan Perubahan Ekuitas
Lampiran 4	Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran 5	LRA Belanja
Lampiran 6	LRA Pendapatan
Lampiran 7	Laporan BMN
Lampiran 8	Laporan Penyusutan
Lampiran 9	Laporan BLU
Lampiran 10	Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan
Lampiran 11	SP-DIPA Induk
Lampiran 12	LHR Tunggakan Insentif 2022
Lampiran 13	Daftar Ketidaksesuaian Kode Akun
Lampiran 14	Monitoring Transfer Masuk dan Transfer Keluar
Lampiran 15	Laporan Hibah
Lampiran 16	Daftar Resiprokal
Lampiran 17	Monitoring RPATA
Lampiran 18	Daftar PPO
Lampiran 19	IHR/CHR Inspektorat Jenderal
Lampiran 20	Progress Tindak Lanjut LHP

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

15 Mei 2024

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan,



drg. Arianti Anaya, MKM

Nomor : KU.04.03/F/1039/2024
Sifat : Rahasia
Perihal : Surat Representasi Manajemen atas
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tenaga
Kesehatan Tahun 2023

Yth. Menteri Kesehatan
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta 12950

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Surat Representasi ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami, representasi berikut ini telah kami buat kepada BPK RI selama pemeriksaan:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP;
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada BPK RI;
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
5. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan;
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan;
9. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2023 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern;
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian internal dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan 2023;

13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian internal dalam hal:
 1. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah; dan
 2. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Kementerian Kesehatan dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material;
15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP;
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan;
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
18. Kami telah mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi, dan mempertimbangkan semua dampak keuangan dari pandemi COVID-19 dan dampak peristiwa signifikan lainnya pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2023; dan
19. Kami telah menyajikan dalam Laporan Keuangan dan/atau telah mengungkapkan semua pengungkapan yang diperlukan terkait dengan dampak dari pandemi COVID-19 tersebut.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023.

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan,



drg. Arianti Anaya, MKM

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual ini, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan. Secara ringkas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023 Audited diuraikan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada periode 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.373.920.021.983,00 atau mencapai 127,14% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.080.675,714.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.933.418.936.651,00 atau mencapai 96,89% dari alokasi anggaran sebesar Rp6.123.679.695.000,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2023			31 Desember 2022
	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan Negara	1.080.675.714.000	1.373.920.021.983	127,14	1.179.008.228.142
Belanja Negara	6.123.679.695.000	5.933.418.936.651	96,89	8.229.356.881.892

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada periode 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp18.158.780.916.443,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp881.304.819.433,00 Aset Tetap (netto) sebesar Rp17.466.508.608.741,00 Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp4.666.205.892,00 dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp166.301.282.377,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp174.420.854.867,00 dan Rp18.344.360.061.576,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	Tanggal Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Jumlah	%
ASET				
Aset lancar	881.304.819.433	821.925.604.125	59.379.215.308	7,22
Aset Tetap	17.466.508.608.741	16.696.474.900.294	770.033.708.447	4,61
Piutang Jangka Panjang	4.666.205.892	4.680.395.892	(14.190.000)	(0,30)
Aset lainnya	166.301.282.377	35.733.294.338	130.567.988.039	365,40
Jumlah Aset	18.518.780.916.443	17.558.814.194.649	959.966.721.794	5,47
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	174.420.854.867	190.657.348.468	(16.236.493.601)	(8,52)
Ekuitas Dana				
Ekuitas	18.344.360.061.576	17.368.156.846.181	976.203.215.395	5,62
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	18.518.780.916.443	17.558.814.194.649	959.966.721.794	5,47

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.346.424.036.733,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp4.980.795.112.375,00, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp3.634.371.075.642,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp26.241.957.877,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp3.660.613.033.519,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17.368.156.846.181,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp3.660.613.033.519,00 kemudian ditambah/ dikurangi koreksi-koreksi senilai Rp35.832.602.526,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.672.648.851.440,00 sehingga Ekuitas akhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp18.344.360.061.576,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan

lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023		% thd Angg	2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.080.675.714.000	1.373.920.021.983	127,14	1.179.008.228.142
JUMLAH PENDAPATAN		1.080.675.714.000	1.373.920.021.983	127,14	1.179.008.228.142
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	1.019.772.453.000	1.006.492.491.311	98,70	1.074.313.095.519
Belanja Barang	B.4	3.744.710.041.000	3.600.488.591.534	96,15	6.364.340.243.904
Belanja Modal	B.5	1.359.197.201.000	1.326.437.853.806	97,59	790.703.542.469
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		-
JUMLAH BELANJA		6.123.679.695.000	5.933.418.936.651	96,89	8.229.356.881.892

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	287.693.157
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	8.500.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	7.043.599.570	1.476.291.802
Kas pada Badan Layanan Umum	C.4	769.261.508.320	700.954.037.076
Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum	C.5	69.973.861.176	59.101.538.282
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.6	3.059.441.328	12.928.464.546
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.7	1.456.767.557	858.710.313
Piutang Bukan Pajak	C.8	239.576.697	561.403.609
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.12	(74.822.802)	(76.431.937)
Bagian Lancar TP/TGR	C.9	12.000.000	12.000.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian LancarTagihan TP/TGR		(60.000)	(60.000)
Piutang dari BUN		-	-
Piutang dari kegiatan Operasional BLU	C.10	1.397.223.000	2.030.413.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.12	(217.039.365)	(204.916.815)
Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU	C.11	33.104.502	5.285.989
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.12	(165.522)	(26.430)
Persediaan	C.13	29.119.824.972	43.982.701.533
Persediaan yang Belum Diregister		-	-
Jumlah Aset Lancar		881.304.819.433	821.925.604.125
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.21	4.937.522.766	4.952.022.766
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang TP/TGR	C.22	(271.316.874)	(271.626.874)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		4.666.205.892	4.680.395.892
ASET TETAP			
Tanah	C.14	11.014.249.686.625	11.037.758.863.844
Peralatan dan Mesin	C.15	4.143.550.526.219	3.718.869.760.331
Gedung dan Bangunan	C.16	5.674.420.006.864	5.075.262.113.104
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.17	120.193.170.572	115.717.935.971
Aset Tetap Lainnya	C.18	103.704.056.069	99.567.151.666
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	560.359.618.560	400.684.191.646
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(4.149.968.456.168)	(3.751.385.116.268)
Jumlah Aset Tetap		17.466.508.608.741	16.696.474.900.294
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.23	37.777.621.745	57.401.964.723
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.24	114.654.643.310	-
Aset Lain-lain	C.25	625.856.238.217	594.496.288.660
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.26	(611.987.220.895)	(616.164.959.045)
Jumlah Aset Lainnya		166.301.282.377	35.733.294.338
JUMLAH ASET		18.518.780.916.443	17.558.814.194.649
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.27	101.823.632.120	74.158.653.584
Utang kepada Pihak Ketiga II	C.28	-	46.732.145.487
Pendapatan Diterima di Muka	C.29	72.469.573.988	69.476.915.690
Uang Muka dari KPPN	C.30	0	287.693.157
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.31	127.648.759	1.940.550
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		174.420.854.867	190.657.348.468
JUMLAH KEWAJIBAN		174.420.854.867	190.657.348.468
EKUITAS			
Ekuitas	C.32	18.344.360.061.576	17.368.156.846.181
JUMLAH EKUITAS		18.344.360.061.576	17.368.156.846.181
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		18.518.780.916.443	17.558.814.194.649

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.346.424.036.733	1.180.944.825.834
JUMLAH PENDAPATAN		1.346.424.036.733	1.180.944.825.834
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1.354.927.435.335	1.383.267.661.834
Beban Persediaan	D.3	68.693.870.919	59.021.456.697
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.323.501.729.515	5.122.483.633.214
Beban Pemeliharaan	D.5	211.688.181.777	210.040.798.119
Beban Perjalanan Dinas	D.6	561.336.328.881	509.485.931.051
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	5.945.769.101	7.208.807.899
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	454.664.845.375	411.130.639.003
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	36.951.472	461.313.135
JUMLAH BEBAN		4.980.795.112.375	7.703.100.240.952
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3.634.371.075.642)	(6.522.155.415.118)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non lancar	D.12	6.623.060.754	3.221.107.725
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.13	53.550.142.066	16.407.876.894
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(46.927.081.312)	(13.186.769.169)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	21.269.891.327	27.514.555.762
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.15	584.767.892	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		20.685.123.435	27.514.555.762
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(26.241.957.877)	14.327.786.593
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(3.660.613.033.519)	(6.507.827.628.525)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.16	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.17	-	-
Beban Persediaan	D.18	-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(3.660.613.033.519)	(6.507.827.628.525)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	17.368.156.846.181	16.507.001.798.453
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(3.660.613.033.519)	(6.507.827.628.525)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(35.832.602.526)	54.474.460.009
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	1.306.800	69.178.695
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.3	21.445.871.095	126.417.400
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.5	(66.328.619.948)	21.317.995.743
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.6	9.048.839.527	32.960.868.171
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	4.672.648.851.440	7.314.508.216.244
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		976.203.215.395	861.155.047.728
EKUITAS AKHIR	E.6	18.344.360.061.576	17.368.156.846.181

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Kesehatan

*Rencana
Strategis*

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 didasarkan pada visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong”.

Visi misi Kementerian Kesehatan mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong. Visi tersebut diwujudkan dengan 9 (sembilan) misi Presiden 2020-2024 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Kerangka Logis Program

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagaimana tercantum dalam

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan memiliki tugas untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan. Adapun penjabarannya tercantum dalam Kerangka Logis Program Ditjen Tenaga Kesehatan.

Tujuan	Transformasi SDM Kesehatan Tepuhnya SDM Kesehatan Yang Kompeten dan Berdedikasi					
Sasaran Strategis	Memperkuat sistem pelayanan abatan fungsional dan karir SDM		Memperkuat pemerataan dan pemerataan SDM yang berkualitas		Memperkuat kompetensi dan sistem Pendidikan pelatihan SDM	
Program	Program Yankes JKN			Program Diklat Vokasi		
KPI	Persentase Puskesmas dengan dokter	Persentase Puskesmas dengan 0 jenis tenaga Kesehatan sesuai standar	Persentase RSUD Kab/Kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	Persentase pemelenggaraan uji kompetensi abatan fungsional Kesehatan yang terakreditasi	Jumlah SDM yang difungsikan kompetensinya untuk mendukung sistem kesehatan kesehatan	Jumlah SDM yang difungsikan kompetensinya sesuai dengan penyakit prioritas
Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Perencanaan Tenaga Kesehatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprifesian Tenaga Kesehatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Dokter/ Dokter Gigi Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan 			<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan Pembinaan dan Perbaikan Pendidikan Tinggi Pelaksanaan Intensi Tenaga Kesehatan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan 		

Rencana Program

Program, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program serta Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan ialah sebagai berikut:

a. Program Yankes JKN

Sasaran Program : meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar indikator kinerja program:

1. Persentase puskesmas dengan dokter sebesar 100%;
2. Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;
3. Persentase RSUD Kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 85%; dan
4. Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang terakreditasi sebesar 60%.

Untuk kegiatan, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan yang terdapat pada Program Yankes JKN ialah sebagai berikut:

a. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pendayagunaan tenaga kesehatan.

Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Persentase Puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter sebesar 100%;
2. Persentase Puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi sebesar 60%;
3. Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar sebesar 90%;
4. Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri (LLN) yang kompeten mengikuti program adaptasi sebesar 100%; dan
5. Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan sebanyak 3.200 orang.

b. Kegiatan Perencanaan Tenaga Kesehatan

Sasaran Kegiatan: meningkatnya perencanaan tenaga kesehatan.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas sebesar 100%.

c. Kegiatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan.

Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan sebesar 100%.

d. Kegiatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Dokter/Dokter Gigi

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Dokter/Dokter Gigi.

Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase STR dokter dan dokter gigi yang diterbitkan sesuai janji layanan sebesar 100%.

e. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan

Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar sebesar 100%;
2. Tersusunnya regulasi Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan sebanyak 15 regulasi*);

3. Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai janji layanan sebesar 100%*);
4. Terlaksananya pengawasan tenaga kesehatan sesuai janji layanan sebesar 100%*);
5. Terlaksananya dukungan terhadap penjaminan perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi tenaga Kesehatan sebesar 100%*); dan
6. Jumlah SDM Kesehatan yang Tersertifikasi Kompetensi sebanyak 1.200 orang*).

Keterangan : *) merupakan indikator kinerja kegiatan di internal Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

b. Program Diklat Vokasi

Sasaran Program : meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar indikator kinerja program :

1. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan Kesehatan sebanyak 28.000 orang, dan
2. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas sebanyak 25.000 orang.

Untuk kegiatan, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan yang terdapat pada Program Diklat Vokasi ialah sebagai berikut:

a. Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan

Sasaran Kegiatan : Terlaksananya penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Jumlah calon dokter dari daerah prioritas yang menerima beasiswa pendidikan sebanyak 2.200 orang;

2. Jumlah tenaga kesehatan di daerah prioritas yang menerima beasiswa Pendidikan sebanyak 1.314 orang;
 3. Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa Pendidikan SDM sebesar 90%;
 4. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui beasiswa jalur Pendidikan sebanyak 10.991 orang;
 5. Persentase dokter spesialis penerima beasiswa yang ditempatkan sesuai perjanjian penempatan sebesar 100%; dan
 6. Jumlah perguruan tinggi yang melaksanakan program AHS sebanyak 70 Perguruan Tinggi.
- b. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
- Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pembinaan dan pengelolaan Pendidikan tinggi di Poltekkes Kemkes
- Indikator kinerja kegiatan :
- Persentase lulusan Poltekkes Kemenkes yang diterima sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas sebesar 50%.
- c. Kegiatan Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan
- Sasaran Kegiatan : Terlaksananya internsip dokter.
- Indikator Kinerja kegiatan : Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) sebesar 98%.
- d. Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
- Sasaran Kegiatan : Terlaksananya peningkatan mutu tenaga kesehatan Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi sebanyak 32.000 orang;
2. Jumlah tenaga kesehatan di dinkes kabupaten/kota yang terlatih surveilans epidemiologi sebanyak 1.600 orang;
3. Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi sebanyak 4.000 orang;
4. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi sebanyak 30.000 orang; dan
5. Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang Kesehatan yang terakreditasisebesar 90%.

c. Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program : Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberiandukungan manajemen Kementerian Kesehatan.

Indikator kinerja program :

1. Nilai reformasi Birokrasi sebesar 85%;
2. Nilai kinerja anggaran sebesar 35%;
3. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjut Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan*) sebesar 92,5%; dan
4. Persentase realisasi anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan*) sebesar 95%.

Keterangan : *) merupakan IKP baru menyesuaikan

dengan Perjanjian Kinerja.

Untuk kegiatan, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan yang terdapat pada Program Dukungan Manajemen ialah sebagai berikut:

a. Kegiatan Tata Kelola SDM

Sasaran Kegiatan:

Pelatihan dan peningkatan kualifikasi bagi ASN di Kemenkes Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Jumlah SDM Kementerian Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sebanyak 11.439 Orang; dan
2. Jumlah SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya sebanyak 5.111 orang.

b. Kegiatan dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Nilai reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebesar 85; dan
2. Nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebesar 98;
3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebesar 92,5; dan
4. Persentase realisasi anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebesar 95.

Kebijakan

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan ditetapkan sejalan dengan transformasi kesehatan pilar SDM Kesehatan, dengan tujuan: “SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan”.

Dalam rangka menjalankan kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan merumuskan strategi hingga tahun 2024 yaitu:

1. Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM Kesehatan yang berkualitas difokuskan pada:
 - a. Pemenuhan 9 Nakes di Puskesmas melalui Penugasan Khusus;
 - b. Pemenuhan dokter di Puskesmas;
 - c. Pemenuhan dokter spesialis di RSUD;
 - d. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan WNI Lulusan Luar Negeri; dan
 - e. Penyediaan Formasi ASN (CPNS dan P3K) di Puskesmas dan RS.
2. Meningkatnya kompetensi dan sistem Pendidikan pelatihan SDM Kesehatan difokuskan pada:
 - a. Beasiswa calon dokter. dokter spesialis;
 - b. Beasiswa calon tenaga kesehatan;
 - c. Beasiswa bagi SDM Kesehatan;
 - d. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
 - e. Mobilisasi Institusi Pelatihan (Daerah, Rumah Sakit, Organisasi Profesi, dan swasta) dalam rangka Pelatihan Bidang Kesehatan;
 - f. Akeselerasi produksi dokter dan dokter spesialis; dan
 - g. Standardisasi pendidikan dan kompetensi tTenaga kesehatan.
3. Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional

dan karir SDM kesehatan difokuskan pada:

- a. Penguatan pengelolaan jabatan fungsional;
- b. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan melalui sistem kompensasi; dan
- c. Pembinaan karir tenaga kesehatan di Fasyankes swasta pemberi layanan JKN.

Kerangka Kelembagaan

Dalam mengimplementasikan rencana strategis, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan perlu mengenali dan memetakan kerangka kelembagaan untuk mencapai sasaran strategisnya, meliputi uraian tugas, fungsi, struktur organisasi, dan tata laksana antar unit organisasi, termasuk di dalamnya pengelolaan dan/atau manajemen SDM yang baik secara kuantitas maupun kualitas. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pembinaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pelatihan,

peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan;

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Selain mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan juga mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Terkait Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia beserta perubahannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2023, sedangkan untuk Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia beserta perubahannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2023.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan;
3. Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan;
4. Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
5. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan;
6. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan;
7. Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia; dan
8. Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia.

Selain Unit Kerja Kantor Pusat, Ditjen Tenaga Kesehatan juga mempunyai Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 38 Poltekkes dan 7 BBPK/Bapelkes. Unit Pelaksana Teknis Ditjen Tenaga Kesehatan dalam bidang pendidikan terdiri dari 38 Poltekkes Kemenkes yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Poltekkes Kemenkes telah dialihbinakan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam SKB Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tanggal 5 agustus tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Poltekkes Kemenkes. Alih bina tersebut diperkuat dengan Surat Keputusan Kemendikbud Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Program Studi pada Poltekkes Kemenkes dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam SKB alih bina tersebut, disebutkan bahwa Menteri Kesehatan mempunyai peran dalam melakukan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan pendidikan sedangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan akademik terhadap penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Poltekkes Kemenkes telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan beserta perubahannya Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 12 Tahun 2023. Dalam penmenkes tersebut disebutkan bahwa Poltekkes Kemenkes merupakan UPT dalam bentuk perguruan tinggi yang melaksanakan tugas di bidang pendidikan vokasi bidang kesehatan.

Pada bidang pelatihan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan beserta perubahannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2021. Dalam Permenkes tersebut di antaranya menyatakanklasifikasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan terdiri dari :

1. Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK); dan
2. Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)

Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah memiliki peran dalam empat aspek, yaitu pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan. Keempat aspek tersebut dijalankan secara harmonis dan saling mendukung dalam proses pelaksanaan pembangunan. Lebih lanjut lagi, semenjak adanya desentralisasi, pemerintah pusat memiliki peran steering yang cukup besar dibandingkan rowing. Artinya, peran pengaturan, pembinaan, dan pengawasan merupakan porsi terbesar dalam tugas dan fungsi pemerintah pusat dibandingkan dengan peran pelaksanaan (yang merupakan peran terbesar pemerintah daerah). Menyadari bahwa urusan kesehatan merupakan urusan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan, maka Kementerian Kesehatan juga memiliki tugas dan fungsi untuk menjamin

keseimbangan berbagai pihak yang terlibat, menyusun aturan main dan mengevaluasi proses pelaksanaannya melalui peran pengaturan, pembinaan, dan pengawasan. Dengan demikian, kerangka regulasi yang merupakan suatu kerangka untuk mengatur pola dan aturan main serta unsur pendukung terkait pelaksanaan pembangunan tersebut merupakan hal yang utama pada konteks ini.

Regulasi atau peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan acuan dalam bertindak, baik bagi penyelenggara negara maupun bagi masyarakat, termasuk di bidang kesehatan. Untuk itu, peraturan perundang-undangan selayaknya dirumuskan dengan jelas, tegas, sinkron, dan konsisten sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk juga sebaiknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau berlaku efektif dan efisien serta memprioritaskan kualitas dibandingkan kuantitas, hal ini dimaksudkan agar tidak menyulitkan setiap pihak untuk menerapkan dan mematuhi sehingga dapat dilakukan simplifikasi terhadap peraturan yang telah ada. Hanya dengan peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas, maka kepastian hukum dapat terwujud sehingga mampu membangun keteraturan hukum yang kondusif bagi pencapaian kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Pada konteks Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, kerangka regulasi diperlukan sebagai unsur pendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kesehatan. Sehingga, sasaran yang bersifat strategis dapat dicapai dengan melihat contextual factorsnya dalam kerangka regulasi yang secara jelas mendefinisikan aturan main dari teknis operasional dan pelibatan berbagai pihak di dalamnya.

Semakin banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibentuk, dalam perjalanannya ditemukan beberapa peraturan yang tumpang tindih yang dalam hal ini mengidentifikasi belum harmonis, efektif dan efisiennya sebagian peraturan perundang-undangan yang ada. Beberapa permasalahan yang ditemui dalam implementasi peraturan perundang-undangan antara lain terdapat konflik, multi-tafsir, inkonsisten, dan tidak operasional baik dengan peraturan yang setingkat maupun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut perlu dilakukan pembenahan antara lain melakukan kajian sebelum menyusun peraturan perundang-undangan, penguatan partisipasi pemangku kepentingan atau uji publik, melakukan simplifikasi dan penyaringan kelayakan. Selain itu, peraturan yang telah disusun perlu dilakukan uji materi dan penyebarluasan agar peraturan tersebut dapat mampu laksana dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang berkeadilan sosial.

Regulasi bidang kesehatan dibutuhkan dalam upaya mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kesehatan yang sejalan dengan visi misi Presiden. Urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan diwujudkan dalam bentuk program dan pelayanan bidang kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan regulasi yang memadai sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Regulasi bidang kesehatan antara lain dalam bentuk Rancangan UU, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan/Keputusan Presiden, Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan serta produk hukum lain bidang kesehatan. Penyusunan atau perubahan regulasi disesuaikan dengan tantangan global, regional dan nasional

namun tetap terarah dalam mendukung program prioritas nasional pembangunan kesehatan.

Kepastian hukum semakin penting untuk diwujudkan dalam rangka mengatur dinamika dan perilaku sosial dalam berbagai kegiatan termasuk penyelenggaraan negara dan pembangunan. Di bidang kesehatan kepastian hukum sangat mempengaruhi mutu pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya dimaksudkan untuk mengatasi suatu permasalahan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, menciptakan ketertiban dan keamanan, memperbaharui perilakumasyarakat, dan untuk mengarahkan atau mendorong pelaksanaan pembangunan. Oleh karenanya, kebutuhan akan peraturan perundang-undangan perlu dibuat dalam suatu kerangka regulasi dan dituangkan ke dalam dokumen perencanaan agar lebih terarah dan terstruktur.

UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) mengamanatkan kerangka regulasi menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Kerangka regulasi merupakan upaya memberikan dasar hukum bagi setiap kebijakan dan tindakan, sehingga kerangka regulasi harus dibuat dengan baik agar kebijakan yang diimplementasikan berjalan dengan baik dan mencapai sasaran.

Dukungan regulasi yang baik dan tepat memerlukan sistem perencanaan yang matang dalam bentuk kerangka regulasi. Pengelolaan kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan sektor kesehatan yang dikawal oleh Kementerian Kesehatan bertujuan untuk:

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan program

- pemerintahan dan pembangunan bidang kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan kesehatan; dan
 3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan.

Berdasarkan kebutuhan kerangka regulasi RPJMN bidang kesehatan di atas, dan sasaran strategis serta faktor pendukung pencapaian Rencana Strategi Kementerian Kesehatan, maka kerangka regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mencapai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota;
2. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan PP Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
3. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Internsip Dokter dan Dokter Gigi;
4. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan KTKI;
5. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan WNA;
6. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Program Adaptasi Dokter Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri;
7. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan evaluasi Kompetensi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing; dan
8. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan.

Kerangka Target dan Pendanaan

Kerangka pendanaan meliputi peningkatan pendanaan dan efektivitas pendanaan untuk mendukung tercapainya sasaran program yang tertuang dalam RAP Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan 2020-2024. Peningkatan pendanaan kesehatan dilakukan melalui peningkatan proporsi anggaran kesehatan secara signifikan guna meningkatkan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dengan mengefektifkan peran dan kewenangan Pusat dan Daerah, sinergitas pelaksanaan pembangunan kesehatan Pusat-Daerah, sinergitas pelaksanaan pembangunan kesehatan pusat-daerah. Sumber pendanaan Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan terdiri atas 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi Kesehatan dan fungsi pendidikan. Anggaran fungsi Pendidikan terdapat pada 2 (dua) Kegiatan, yaitu Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Kegiatan Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan. Sumber dana program di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), serta hibah.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi

keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Satker Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023 yang memperoleh APBN menurut jenis kewenangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

No	Kode Es I	Satker	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	12	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	1	45	0	0	46
Jumlah			1	45	0	0	46

Terdapat satu Satuan Kerja Kantor Pusat pada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yaitu Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kantor Daerah terdiri dari tujuh Balai dan 38 Politeknik Kesehatan (Poltekkes). Satuan Kerja Balai adalah sebagai berikut:

1. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta;
2. Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang;
3. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto;
4. Balai Pelatihan Kesehatan Semarang;
5. Balai Pelatihan Kesehatan Batam;
6. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar; dan
7. Balai Pelatihan Kesehatan Mataram.

Satuan Kerja Politeknik Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Daftar Satuan Kerja Politeknik Kesehatan

NO	NAMA SATKER POLTEKKES	NO	NAMA SATKER POLTEKKES
1	Poltekkes Jakarta I	20	Poltekkes Palangkaraya
2	Poltekkes Jakarta II	21	Poltekkes Banjarmasin
3	Poltekkes Jakarta III	22	Poltekkes Kalimantan Timur
4	Poltekkes Bandung	23	Poltekkes Manado
5	Poltekkes Tasikmalaya	24	Poltekkes Palu
6	Poltekkes Semarang	25	Poltekkes Makassar
7	Poltekkes Surakarta	26	Poltekkes Kendari
8	Poltekkes Jogjakarta	27	Poltekkes Maluku
9	Poltekkes Malang	28	Poltekkes Ternate
10	Poltekkes Surabaya	29	Poltekkes Jayapura
11	Poltekkes Aceh	30	Poltekkes Denpasar
12	Poltekkes Medan	31	Poltekkes Mataram
13	Poltekkes Padang	32	Poltekkes Kupang
14	Poltekkes Pekanbaru	33	Poltekkes Gorontalo
15	Poltekkes Jambi	34	Poltekkes Banten
16	Poltekkes Palembang	35	Poltekkes Pangkal Pinang
17	Poltekkes Tanjung Karang	36	Poltekkes Tanjung Pinang
18	Poltekkes Bengkulu	37	Poltekkes Mamuju
19	Poltekkes Pontianak	38	Poltekkes Sorong

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan
-LRA*

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
-LO*

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan

barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2019. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap

hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk

dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal

pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Perubahan Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Setelah Revisi

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Perpajakan	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.058.566.504.000	1.080.675.714.000
Pendapatan BLU	768.007.014.000	818.557.354.000
Pendapatan PNBP Lainnya	290.559.490.000	262.118.360.000
Jumlah Pendapatan	1.058.566.504.000	1.080.675.714.000
Belanja		
Belanja Pegawai	1.081.944.578.000	1.019.772.453.000
Belanja Barang	3.685.764.358.000	3.744.710.041.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Belanja Modal	1.048.833.982.000	1.359.197.201.000
Jumlah Belanja	5.816.542.918.000	6.123.679.695.000

Realisasi Pendapatan
Rp1.373.920.021.983

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.373.920.021.983,00 atau mencapai 127,14% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.080.675.714.000,00. Pendapatan

Lingkup Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum; Pendapatan Hasil Kerjasama BLU; Pendapatan dari Alokasi APBN; Pendapatan BLU Lainnya; Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya; Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan; Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi; Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan; Pendapatan Denda dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi dan realisasi pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2023
(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	793.408.716.000	1.001.196.186.940	126,19
4243	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	4.424.141.000	9.246.602.218	209,00
4244	Pendapatan Dari Alokasi APBN	-	587.060.000	-
4249	Pendapatan BLU Lainnya	20.724.497.000	59.426.623.451	286,75
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran badan Usaha	2.903.359.000	10.898.345.553	375,37
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan	42.088.105.000	91.008.345.000	216,23
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	217.126.896.000	174.341.292.567	80,29
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	-	2.400.000	-
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan	-	21.394.676	-
4258	Pendapatan Denda	-	3.805.075.362	-
4259	Pendapatan Lain-lain	-	23.386.696.216	-
Jumlah		1.080.675.714.000	1.373.920.021.983	127,14

Realisasi pendapatan terbesar dari total realisasi tahun 2023 adalah realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar Rp1.001.196.186.940,00. Sedangkan, persentase realisasi terbesar jika dibandingkan dengan estimasi pendapatannya adalah realisasi Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha yaitu 375,37% dari estimasi pendapatannya.

Rincian perbandingan Realisasi pendapatan tahun 2023 dan tahun 2022 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	%
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	1.001.196.186.940	810.523.693.844	23,52
4243	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	9.246.602.218	5.420.004.513	70,60
4244	Pendapatan Dari Alokasi APBN	587.060.000	213.600.000	174,84
4249	Pendapatan BLU Lainnya	59.426.623.451	28.848.060.417	106,00
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran badan Usaha	10.898.345.553	5.585.008.097	95,14
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan	91.008.345.000	69.300.130.000	31,32
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	174.341.292.567	228.738.471.327	(23,78)
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	2.400.000	-	100,00
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan	21.394.676	161.328.495	(86,74)
4258	Pendapatan Denda	3.805.075.362	1.320.420.661	188,17
4259	Pendapatan Lain-lain	23.386.696.216	28.897.510.788	(19,07)
Jumlah		1.373.920.021.983	1.179.008.228.142	16,53

Realisasi Pendapatan tahun 2023 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 16,54% dibandingkan tahun 2022 dengan rincian nilai signifikan sebagai berikut :

1. realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 23,52% dibandingkan tahun 2022 disebabkan penambahan satuan kerja yang menjalankan pola pengelolaan keuangan BLU dari sebelumnya 18 satuan kerja pada tahun 2022 menjadi 28 satuan kerja per 31 Desember 2023. Penambahan satker BLU juga mengakibatkan adanya penurunan realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi sebesar 23,78% dibandingkan tahun 2022;
2. realisasi Pendapatan Dari Alokasi APBN mengalami kenaikan 174,84% dibandingkan tahun 2022 disebabkan penambahan satuan kerja yang mengakui pendapatan tersebut dari sebelumnya satu satker di tahun 2022 menjadi dua satker di tahun 2023. Pendapatan ini merupakan pendapatan yang diterima dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan untuk membayar uang pendidikan pegawai Kementerian Kesehatan yang mengikuti Tugas Belajar di Poltekkes;
3. realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama BLU mengalami kenaikan 70,60% dibandingkan tahun 2022. Pendapatan Hasil Kerjasama mengalami kenaikan disebabkan adanya peningkatan nilai pendapatan yang diperoleh dari optimalisasi aset seperti Perjanjian Kerjasama (PKS) pemanfaatan lahan/ruangan Poltekkes, serta adanya penambahan empat satuan

kerja yang menggunakan skema kerjasama dengan pihak ketiga.; dan

4. realisasi Pendapatan Denda tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 188,17% dibandingkan tahun 2022. Pendapatan Denda terdapat pada 33 satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Tidak terdapat kenaikan jumlah satuan kerja yang memiliki realisasi pendapatan denda di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022, namun terdapat kenaikan kuantitas dan/ atau nilai dari pekerjaan pengadaan barang/ jasa yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023.

Realisasi Belanja
Rp5.933.418.936.651

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah Rp5.933.418.936.651,00 atau 96,84% dari anggaran belanja sebesar Rp6.123.679.695.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	1.019.772.453.000	1.007.021.581.839	98,75
Belanja Barang	3.744.710.041.000	3.618.741.142.443	96,64
Belanja Modal	1.359.197.201.000	1.326.463.887.572	97,59
Total Belanja Kotor	6.123.679.695.000	5.952.226.611.854	97,20
Pengembalian Belanja	-	18.807.675.203	0,00
Total Belanja	6.123.679.695.000	5.933.418.936.651	96,89

Dibandingkan dengan Tahun 2022. Anggaran Belanja Per 31 Desember 2023 mengalami penurunan signifikan sebesar 29,94% dibandingkan anggaran belanja pada tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11
Perbandingan Anggaran Belanja TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran TA 2023	Anggaran TA 2022	% Kenaikan (Penurunan)
Belanja Pegawai	1.019.772.453.000	1.151.880.022.000	(11,47)
Belanja Barang	3.744.710.041.000	6.732.276.292.000	(44,38)
Belanja Modal	1.359.197.201.000	856.150.911.000	58,76
Jumlah	6.123.679.695.000	8.740.307.225.000	(29,94)

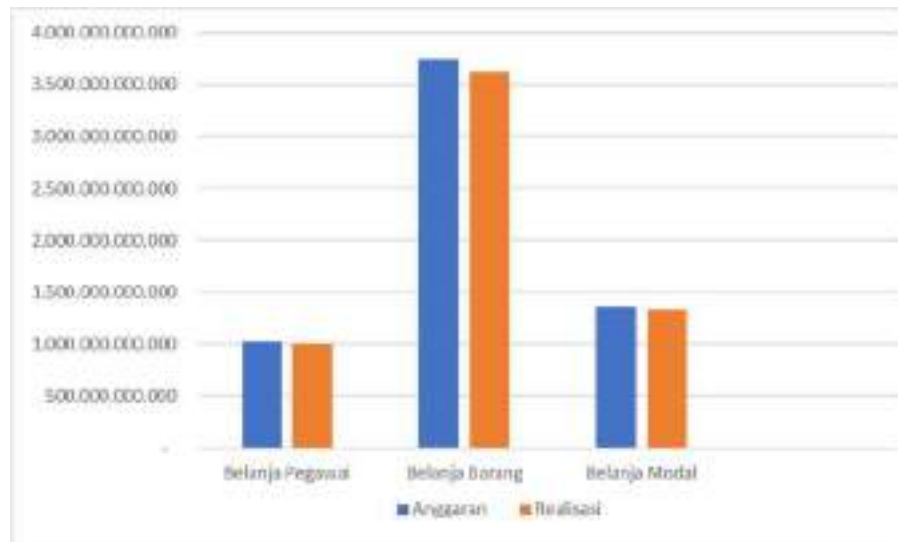
Komposisi anggaran menurut jenis belanja dapat dilihat dalam diagram berikut:

Diagram 1
Komposisi Anggaran Tahun 2023



Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 1
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023



Penurunan anggaran belanja sebesar 29,94% disebabkan antara lain:

1. Penurunan anggaran belanja pegawai sebesar 11,47% disebabkan adanya perpindahan satker pembayar gaji pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan ke Unit Eselon I Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan serta adanya refocussing anggaran belanja pegawai; dan
2. Penurunan signifikan anggaran Belanja Barang sebesar 44,38%. Hal ini disebabkan penurunan anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 seiring menurunnya kasus COVID 19 dan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia tanggal 22 Juni 2023.

Anggaran belanja Insentif tenaga kesehatan tahun 2023 diperuntukkan untuk pembayaran tunggakan insentif tahun 2022 dan insentif tenaga kesehatan bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2023.

Penurunan anggaran belanja PEN untuk penanganan pandemi COVID-19 juga berdampak pada penurunan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2023 dibandingkan realisasi belanja pada tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	% Kenaikan (Penurunan)
Belanja Pegawai	1.006.492.491.311	1.074.313.095.519	(6,31)
Belanja Barang	3.600.488.591.534	6.364.340.243.904	(43,43)
Belanja Modal	1.326.437.853.806	790.703.542.469	67,75
Jumlah	5.933.418.936.651	8.229.356.881.892	(27,90)

1. Realisasi belanja pegawai mengalami penurunan sebesar 6,31% karena terdapat perubahan pembayaran belanja pegawai sejak awal tahun 2023 pembayaran belanja pegawai yang semula di Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan untuk pegawai kantor pusat dialihkan ke Biro Umum Setjen Kemenkes;
2. Realisasi belanja barang mengalami penurunan sebesar 43,43% berasal dari penurunan anggaran serta realisasi belanja insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan yang bertugas menangani pandemi COVID- 19 seiring dengan penetapan

berakhirnya status pandemi COVID-19 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia tanggal 22 Juni 2023. Oleh karena itu anggaran dan pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Penanggulangan Pandemi COVID-19 pada Sekretariat Ditjen Nakes hanya untuk pembayaran tunggakan tahun 2022 dan insentif tenaga kesehatan bulan Januari sampai dengan Juni 2023; dan

3. Realisasi belanja modal mengalami kenaikan sebesar 67,75% dikarenakan adanya kenaikan proporsi anggaran belanja modal dari tahun sebelumnya.

Belanja Pegawai
Rp1.006.492.491.311

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.006.492.491.311,00 dan Rp1.074.313.095.519,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 13
Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	% Kenaikan (Penurunan)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	783.068.695.423	822.870.981.492	(4,84)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	6.183.426.824	52.015.813	11.787,59
Belanja Lembur	8.613.610.050	11.518.352.600	(25,22)
Belanja Tunj Khusus & Belanja Pegawai Transito	209.155.849.542	240.531.237.135	(13,04)
Jumlah Belanja Kotor	1.007.021.581.839	1.074.972.587.040	(6,32)
Pengembalian Belanja Pegawai	(529.090.528)	(659.491.521)	(19,77)
Jumlah Belanja	1.006.492.491.311	1.074.313.095.519	(6,31)

Realisasi belanja Pegawai Per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 6,31% dibandingkan pada periode sama tahun 2022. Terdapat penurunan realisasi pada pos Belanja Gaji dan Tunjangan PNS sebesar 4,84% dan pos Belanja Lembur sebesar 25,22% serta Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito sebesar 13,04%.

Realisasi belanja gaji dan tunjangan PPPK mengalami kenaikan sebesar 11.787,59% disebabkan adanya penambahan realisasi belanja pada Belanja Gaji Pokok PPPK terutama pada Poltekkes Kemenkes Surakarta dan Poltekkes Kemenkes Semarang

Sedangkan penurunan realisasi belanja pada Belanja Lembur sebesar 25,22% terutama beban uang lembur

pada Poltekkes Kemenkes Aceh dan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto.

Belanja Barang
Rp3.600.488.591.534

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.600.488.591.534,00 dan Rp6.364.340.243.904,00. Rincian perbandingan realisasi belanja barang tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14
Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	% Kenaikan (Penurunan)
Belanja Barang Operasional	198.674.731.567	158.753.770.117	25,15
Belanja Barang Non Operasional	1.538.706.642.778	4.541.706.892.690	(66,12)
Belanja Barang Persediaan	41.831.749.811	45.886.069.012	(8,84)
Belanja Jasa	377.724.138.878	353.021.235.011	7,00
Belanja Pemeliharaan	180.746.732.045	188.075.714.803	(3,90)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	468.837.034.574	464.167.845.696	1,01
Belanja Perjalanan Luar Negeri	13.041.937.393	2.135.912.436	510,60
Belanja Barang BLU	799.178.175.397	650.066.265.118	22,94
Jumlah Belanja Kotor	3.618.741.142.443	6.403.813.704.883	(43,49)
Pengembalian Belanja	(18.252.550.909)	(39.473.460.979)	(53,76)
Jumlah Belanja	3.600.488.591.534	6.364.340.243.904	(43,43)

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 43,43% dari tahun 2022. Kenaikan dan penurunan realisasi belanja barang secara signifikan terdapat pada komponen :

1. Kenaikan realisasi belanja barang yang signifikan terdapat pada realisasi belanja Perjalanan Luar Negeri yang naik sebesar 510,60% dibandingkan realisasi tahun 2022. Perjalanan Luar Negeri dengan

proporsi terbesar terdapat pada satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

2. Penurunan realisasi belanja barang yang signifikan terdapat pada akun Belanja Barang Non Operasional yaitu sebesar 66,12% berasal dari penurunan realisasi Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID 19 untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan dalam rangka penanganan pandemi COVID 19 karena adanya penetapan berakhirnya status pandemi COVID-19 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023.

Adapun rincian belanja COVID 19 tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 15
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja COVID-19 TA. 2023
(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	35.129.000	33.243.541	94,63
	Jumlah Kotor	35.129.000	33.243.541	94,63
	Pengembalian Belanja	-	-	-
	Jumlah	35.129.000	33.243.541	94,63

Realisasi Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID 19 Per 31 Desember 2023 terdapat pada Poltekkes Mataram dikarenakan kesalahan penggunaan akun belanja untuk zoom meeting pembelajaran. Atas kesalahan penganggaran tersebut tidak dapat dilakukan revisi DIPA dan ralat akun SPM belanja yang telah terealisasi dikarenakan perubahan status Poltekkes Mataram dari satker PNBPN menjadi satker BLU sehingga

belanja yang berasal dari sumber dana PNBPN tidak bisa direvisi.

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp1.326.437.853.806

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.326.437.853.806,00 dan Rp790.703.542.469,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 16
Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	% Kenaikan (Penurunan)
Belanja Modal Tanah	17.574.434.500	234.560.000	7392,51
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	363.388.660.060	234.022.292.693	55,28
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	745.898.661.156	446.868.242.688	66,92
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.662.403.940	466.984.457	684,27
Belanja Modal Lainnya	3.511.118.056	3.034.003.085	15,73
Belanja Modal BLU	192.428.609.860	106.108.270.046	81,35
Jumlah Belanja Kotor	1.326.463.887.572	790.734.352.969	67,75
Pengembalian Belanja	(26.033.766,00)	(30.810.500,00)	(15,50)
Jumlah Belanja	1.326.437.853.806	790.703.542.469	67,75

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 67,75% dibandingkan TA 2022. Kenaikan realisasi belanja modal yang signifikan disebabkan antara lain :

1. kenaikan Belanja Modal Tanah sebesar 7.392,51% pada satker Poltekkes Kemenkes Jayapura dan Poltekkes Kemenkes Jakarta I;

2. kenaikan pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 684,27% terdapat pada satker Bapelkes Cikarang; dan
3. penyerapan anggaran atau realisasi Belanja Modal tahun 2023 lebih optimal dibandingkan tahun 2022.

Belanja Modal Tanah
Rp17.574.434.500

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp17.574.434.500,00 dan Rp234.560.000,00.

Tabel 17
Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	% Kenaikan (Penurunan)
531111	Belanja Modal Tanah	-	234.560.000	(100,00)
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	17.574.434.500		100,00
	Jumlah Belanja Kotor	17.574.434.500	234.560.000	7392,51
	Pengembalian Belanja	-	-	-
	Jumlah Belanja	17.574.434.500	234.560.000	98,67

Belanja Modal Tanah pada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebesar Rp17.574.434.500,00 terdiri dari :

1. Belanja Modal Tanah pada Poltekkes Jayapura sebesar Rp578.677.000,00 merupakan kesalahan akun belanja untuk penimbunan dan pengaspalan jalan masuk kampus pada Prodi DIII Kebidanan Biak, seharusnya menggunakan akun Belanja Modal Jalan dan Jembatan, karena merupakan pengembangan Jalan.

2. Belanja modal tanah pada Poltekkes Jakarta I sebesar Rp16.955.757.500,00 merupakan belanja untuk pengurukan dan pemadatan lahan dalam rangka pembangunan gedung Poltekkes Jakarta I di Gedung Kampus Lebak Bulus III.

*Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp363.365.144.295*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp363.365.144.295,00 dan Rp 234.002.812.193,00.

Tabel 18
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	% Kenaikan (Penurunan)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	363.388.660.060	234.022.292.693	55,28
	Jumlah Belanja Kotor	363.388.660.060	234.022.292.693	55,28
	Pengembalian Belanja	(23.515.766)	(19.480.500)	20,71
	Jumlah Belanja	363.365.144.294	234.002.812.193	55,28

Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar 55,28% bila dibandingkan dengan TA 2022.

Belanja modal peralatan dan mesin pada satker di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mayoritas merupakan pengadaan Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM), kendaraan bermotor, pembelian meubelair kantor, pengadaan AC Gedung perkuliahan, pengadaan peralatan perkantoran, pengadaan alat

pengolah data, pengadaan alat laboratorium dan non laboratorium, pengadaan fasilitas pendidikan dan pelatihan secara e-katalog maupun secara langsung, dan pengadaan fasilitas asrama. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terbesar terdapat pada Poltekkes Semarang sebesar Rp30.235.239.582,00.

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp745.896.143.156*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 745.896.143.156,00 dan Rp446.856.921.688,00. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari pembangunan gedung dan bangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Tabel 19
Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	% Kenaikan (Penurunan)
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	685,668,694,957	439,567,643,698	55.99
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	815,051,729	189,265,960	330.64
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	13,383,620,133	6,587,618,167	103.16
533116	Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	-	94,294,500	(100.00)
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	169,174,798	320,628,563	(47.24)
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	45,862,119,539	108,791,800	42,055.86
Jumlah Belanja Kotor		745,898,661,156	446,868,242,688	66.92
	Pengembalian Belanja Modal	(2,518,000)	(11,330,000)	(77.78)
Jumlah Belanja		745,896,143,156	446,856,912,688	66.92

Belanja Modal pada satker di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan terdiri dari:

1. Pembangunan dan/atau renovasi Gedung Direktorat;
2. Pembangunan Gedung Layanan Pendidikan dan perkuliahan;
3. Pembangunan dan Renovasi Gedung Laboratorium terpadu;
4. Pembangunan dan/atau renovasi Gedung auditorium; dan
5. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar 66,92% dibandingkan tahun 2022. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar 55,99% yang terdapat pada beberapa satker di lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan nilai paling signifikan terdapat pada dua satker, yaitu :

1. Poltekkes Kemenkes Semarang sebesar Rp 80.588.669.545,00 merupakan pembangunan Gedung Science Techno Park (STP), CBT Center dan Pusat Bahasa, Talud dan tempat parkir, serta Gedung Terpadu Kampus VII.
2. Poltekkes Kemenkes Banten sebesar Rp 44.576.992.243,00 merupakan pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu lanjutan dan Pembangunan Laboratorium Kemahasiswaan.

*Belanja Modal Jalan,
Irigasi, dan Jaringan
Rp3.662.403.940.000*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.662.403.940,00 dan Rp466.984.457,00.

Tabel 20
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	% Kenaikan (Penurunan)
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	776.103.700	-	100,00
534115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	16.000.000	-	100,00
534131	Belanja Modal Jaringan	2.507.558.240	466.984.457	436,97
534135	Belanja Modal perencanaan dan Pengawasan Jaringan	147.142.000	-	100,00
534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	215.600.000	-	100,00
Jumlah Belanja Kotor		3.662.403.940	466.984.457	684,27
	Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja		3.662.403.940	466.984.457	684,27

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 684,27% yang di antaranya merupakan Belanja Modal Jaringan pada Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang sebesar Rp2.507.558.240,00 untuk pembangunan instalasi jaringan.

*Belanja Modal
Lainnya
Rp3.511.118.056*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.511.118.056,00 dan Rp 3.034.003.085,00.

Tabel 21
Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	% Kenaikan (Penurunan)
536111	Belanja Modal Lainnya	3.511.118.056	2.935.046.585	19,63
536115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	-	98.956.500	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor		3.511.118.056	3.034.003.085	15,73
	Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja		3.511.118.056	3.034.003.085	15,73

Belanja Modal lainnya terdapat peningkatan sebesar 15,73%. Realisasi Belanja Modal Lainnya merupakan pengadaan buku perpustakaan dan pembuatan serta pengembangan software. Nilai realisasi belanja modal lainnya yang terbesar terdapat pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebesar Rp1.029.398.480,00 terdiri dari:

1. Pembuatan *Software* untuk *Digital Transformation Office* (DTO) antara lain:
 - a. Sistem Aplikasi Satuan Kredit Profesi;
 - b. Aplikasi Sistem Informasi Seleksi Tertulis dan Wawancara Program Pendidikan Dokter Spesialis;
 - c. Aplikasi Sistem Informasi Registrasi dan Seleksi Administrasi Pendidikan Dokter Spesialis; dan
 - d. Aplikasi Sistem Informasi Lookbook Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan.
2. Redesain Website Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan Pembuatan website Perpustakaan Elektronik.

Belanja Modal BLU
Rp 192.428.609.860

B.5.6 Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp192.428.609.860,00 dan Rp106.108.270.046,00. Rincian realisasi Belanja Modal BLU adalah sebagai berikut :

Tabel 22
Realisasi Belanja Modal BLU TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	% Kenaikan (Penurunan)
537111	Belanja Modal Tanah BLU	3.890.531.952	6.359.775.000	(38,83)
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	75.958.832.797	37.526.788.391	102,41
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU	105.006.783.694	59.183.184.745	77,43
537114	Belanja Modal JalanIrigasi dan Jaringan BLU	3.320.668.057	-	100,00
537115	Belanja Modal Lainnya BLU	4.251.793.360	3.038.521.910	39,93
Jumlah Belanja Kotor		192.428.609.860	106.108.270.046	81,35
	Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja		192.428.609.860	106.108.270.046	81,35

Belanja Modal BLU tahun 2023 mengalami kenaikan 81,35% dibanding tahun 2022. Rincian Belanja Modal BLU adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU sebesar Rp75.958.832.797,00 mengalami kenaikan 102,41% dibandingkan tahun 2022. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU yang terbesar terdapat pada Poltekkes Kupang merupakan Pengadaan Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) Laboratorium , Pengadaan ABBM Non Laboratorium, dan Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Komunikasi.

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU sebesar Rp105.006.783.694,00 mengalami kenaikan 77,43% dibandingkan tahun 2022. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU terbesar terdapat pada Poltekkes Kemenkes Semarang sebesar Rp47.378.212.032,00 merupakan pembangunan Gedung Science Techno Park (STP)
3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU sebesar Rp3.320.668.057,00 terdapat pada Poltekkes Pontianak merupakan belanja modal jaringan listrik BLU di kampus A.
4. Belanja Modal Lainnya BLU sebesar Rp4.251.793.360,00 merupakan pengadaan buku perpustakaan dan pengembangan software.

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Capaian Output
Prioritas Nasional*

B.7 Capaian Output Prioritas Nasional

Capaian Output Prioritas Nasional disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 23
Capaian Output Prioritas Nasional
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Kode Program-Kegiatan-KRO-RO	Uraian RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume	Realisasi Volume	Satuan
DG6811PBG'001	Penyusunan Kebijakan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota (SDM)	588.240.000	581.922.265	98,93%	1	1	Rekomendasi Kebijakan
DG6812PBG'001	Penyusunan Kebijakan Penugasan Khusus (SDM)	106.950.000	106.650.000	99,72%	3	3	Rekomendasi Kebijakan
DG6812QAA'001	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim (SDM)	10.770.007.000	10.511.178.773	97,60%	1.200	888	Orang
DG6812QAA'002	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat (SDM)	3.259.255.000	3.252.216.260	99,78%	200	200	Orang
DG6812QAA'003	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu (SDM)	14.448.073.000	13.871.479.467	96,01%	4.000	4.666	Orang
DG6812QAA'004	Pendayagunaan Dokter Spesialis (SDM)	5.552.164.000	5.466.574.389	98,46%	570	565	Orang
DG6812QAA'005	Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat (SDM)	353.280.000	346.981.617	98,22%	30	21	Orang
DG6812QAA'006	Pendayagunaan Dokter Pasca Internsip (SDM)	111.650.000	111.275.000	99,66%	800	2.351	Orang
DG6812QAA'007	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan WNI Lulusan Luar Negeri (SDM)	6.676.437.000	5.949.235.526	89,11%	30	12	Orang
DG6813PDH'001	Registrasi Tenaga Kesehatan (SDM)	15.260.990.000	15.137.132.781	99,19%	380.000	443.930	Orang
DL6822SCM100	Pelatihan Surveilans Epidemiology (SDM)	9.672.073.000	9.564.272.130	98,89%	2.480	3.428	Orang
DL6822SCM101	Pelatihan 9 Penyakit Prioritas (SDM)	34.091.577.000	32.202.649.306	94,46%	4.320	36.510	Orang
DL6822SCM102	Pelatihan Sistem Kesehatan Nasional (SDM)	13.062.865.000	12.773.304.505	97,78%	3.350	3.942	Orang
DL6822SCM103	Pelatihan Stunting (SDM)	4.604.390.000	4.542.359.631	98,65%	795	845	Orang
DL6823PBG'001	Akselerasi Produksi Dokter dan Dokter Spesialis (SDM)	1.021.010.000	954.757.878	93,51%	3	3	Rekomendasi Kebijakan
DL6823QDB'001	Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan (SDM)	1.918.665.000	1.858.742.827	96,88%	38	38	Lembaga
DL6823QDB'002	Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes Yang Meningkatkan Status Akreditasinya (SDM)	1.070.078.000	1.058.028.992	98,87%	24	24	Lembaga
DL6823QEF'001	Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) (SDM)	154.234.913.000	153.377.785.302	99,44%	2.800	2.800	Orang
DL6823QEF'002	Bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDGS) Papua dan Papua Barat (SDM)	7.225.988.000	7.167.974.504	99,20%	100	90	Orang
DL6823QEF'003	Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan (SDM)	66.095.889.000	66.084.385.948	99,98%	1.760	1.882	Orang
DL6823QEF'004	Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Dokter pada DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan (SDM)	55.947.956.000	55.677.804.973	99,52%	800	800	Orang
DL6823QEF'005	Program Bantuan Pendidikan Partial Funding PPDS/PPDGS (SDM)	7.801.445.000	7.599.440.000	97,41%	280	280	Orang
DL6823QEF'006	Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Dutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK (SDM)	15.083.830.000	13.292.884.617	88,13%	1.314	1.314	Orang
DL6823QEF'007	Bantuan Fellowship bagi Tenaga Kesehatan (SDM)	9.393.084.000	9.258.590.470	98,57%	170	166	Orang
DL6823SBA'001	Tenaga Kesehatan Lulusan Poltekkes Kemenkes Yang Didayagunakan di Fasvankes Pemerintah (SDM)	556.484.000	516.980.076	92,90%	1.500	2.427	Orang
		438.907.293.000	431.264.607.237	98,26%	406.568	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp287.693.157,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp8.500.000,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp7.043.599.570*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.043.599.570,00 dan Rp1.476.291.802,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal

pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Kode Akun	Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022	% Kenaikan (Penurunan)
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	385.670.000	4.626.526	8236,06
111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	2.554.560.000	1.121.910.000	127,70
111826	Kas Lainnya di BLU	4.103.369.570	349.755.276	1073,21
	Jumlah	7.043.599.570	1.476.291.802	377,11

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.567.307.768,00 atau sebesar 377,11% dari saldo per 31 Desember 2022. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp385.670.000,00 terdapat pada Poltekkes Jayapura dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kas tunai yang merupakan dana beasiswa GAKIN dan Dana Mahasiswa berprestasi (Mawapres) yang akan disalurkan ke mahasiswa pada tahun 2024 masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 dan Rp137.000.000,00;
- b. Kas tunai berupa dana bantuan pendidikan mahasiswa dari Pemprov Papua sebesar Rp3.000.000,00 yang belum disalurkan oleh bendahara pengeluaran kepada mahasiswa penerima beasiswa yang ditetapkan oleh Pemprov Papua ; dan
- c. Dana bantuan pendidikan mahasiswa dari Boven Dogel sebesar Rp230.370.000,00 yang belum

disalurkan kepada mahasiswa penerima beasiswa yang ditetapkan oleh Pemprov Boven Dogel.

Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah sebesar Rp2.554.560.000,00 pada Poltekkes Jayapura dari Pemerintah Daerah Yahukimo yang diberikan untuk beasiswa mahasiswa di Poltekkes.

Kas Lainnya di BLU sebesar Rp4.103.369.570,00 terdapat pada :

- a. Poltekkes Manado sebesar Rp577.750.000,00 merupakan uang yang berada di rekening dana kelolaan terdiri dari uang asrama dan biaya hidup mahasiswa Bintuni dan Papua, uang sewa toga yang akan dibayarkan ke rekanan, uang makan mahasiswa di asrama yang akan dibayarkan ke rekanan, dan uang pengelolaan asrama.
- b. Poltekkes Surabaya sebesar Rp3.376.008.980,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Dana BLU untuk pembayaran tagihan pihak ketiga atas tiga pekerjaan pada akhir tahun anggaran dengan mekanisme rekening penampungan sebesar Rp3.320.077.980,00.
 2. Biaya admin VA BNI sebesar Rp2.956.000,00 yang belum terdebit oleh pihak bank per 31 Desember 2023;
 3. Dana Bantuan Pendidikan Mahasiswa Papua Selatan yang belum dicairkan dan diserahkan sebesar Rp16.600.000,00 per 31 Desember; dan
 4. Uang Tunai di Bendahara sebesar Rp36.375.000 per 31 Desember 2023 terkait dana pengembalian Beasiswa GAKIN.

- c. Poltekkes Banten sebesar Rp139.624.168 merupakan utang pajak BLU yang belum disetorkan ke kas negara hingga tanggal neraca senilai Rp127.648.759,00 dan utang kepada pihak ketiga BLU senilai 11.975.409,00;
- d. Pada Poltekkes Medan sebesar Rp9.986.422,00 merupakan Dana titipan kegiatan perceptor mentor dari pihak luar Rp10.000.000,00 pada Bank Syariah Indonesia, yang mana dari dana yang tersimpan di bank tersebut terdapat pendapatan bunga yang diterima di Bulan Desember dan belum disahkan sebesar Rp11.422,00 dan terdapat pemotongan biaya administrasi bank sebesar Rp25.000,00 yang akan dikembalikan di Bulan Januari 2024.

Kas pada BLU
Rp769.261.508.320

C.4 Kas pada Badan Layanan Umum

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp769.261.508.320,00 dan Rp700.954.037.076,00. Kas pada Badan Layanan Umum merupakan kas pada bendahara BLU dan setara kas Lainnya BLU. Setara kas yaitu investasi jangka pendek BLU yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Perbandingan Kas pada Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Perbandingan Kas pada Badan Layanan Umum TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Kode Akun	Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022	% Kenaikan (Penurunan)
111911	Kas dan Bank BLU	277.187.303.649	270.647.501.652	2,42
111929	Setara Kas Lainnya BLU	492.074.204.671	430.306.535.424	14,35
	Jumlah	769.261.508.320	700.954.037.076	9,74

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp68.307.471.244,00

atau sebesar 9,74% dari saldo per 31 Desember 2022. Rincian Kas dan Bank Layanan Umum per satker adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Rincian Kas dan Bank Badan Layanan Umum per Satker
(dalam rupiah)

Nama Satker	Tahun 2023	Tahun 2022
Poltekkes Jakarta II	5.718.056.441	3.792.541.645
Poltekkes Jakarta III	14.348.081.304	11.302.148.816
Poltekkes Bandung	39.476.392.721	44.812.360.217
Poltekkes Semarang	13.147.103.278	7.754.177.374
Poltekkes Surakarta	10.112.398.235	10.571.660.029
Poltekkes Yogyakarta	15.812.975.606	23.902.859.439
Poltekkes Surabaya	40.822.336.892	23.677.126.223
Poltekkes Malang	20.071.427.658	27.115.547.950
Poltekkes Medan	1.729.017.024	1.305.880.009
Poltekkes Tanjung Karang	18.643.108.859	9.565.355.905
Poltekkes Bengkulu	6.772.750.751	356.222.302
Poltekkes Pontianak	6.192.777.348	6.870.487.460
Poltekkes Makassar	22.797.820.795	18.249.759.486
Poltekkes Tasikmalaya	4.399.283.292	7.178.621.592
Poltekkes Manado	4.187.856.736	30.642.540.044
Poltekkes Denpasar	380.366.691	10.447.142.348
Poltekkes Kupang	639.910.493	26.350.284.954
Poltekkes Kalimantan Timur	12.943.554.639	6.752.785.859
Poltekkes Padang	5.487.245.621	-
Poltekkes Palembang	9.553.203.137	-
Poltekkes Mataram	1.660.892.971	-
Poltekkes Banjarmasin	1.787.927.503	-
Poltekkes Palu	5.677.503.127	-
Poltekkes Palangkaraya	802.091.299	-
Poltekkes Aceh	3.340.583.194	-
Poltekkes Maluku	1.665.387.056	-
Poltekkes Banten	33.048.444	-
Poltekkes Jambi	8.984.202.534	-
Jumlah	277.187.303.649	270.647.501.652

Atas saldo Kas dan Bank BLU sebesar R80.613.607.962,00 merupakan saldo giro atas Program Pengembangan Operasional (PPO) yang terdapat di 7 satker Poltekkes. Pada giro PPO, bank memberikan fasilitas berupa barang (seperti

kendaraan, peralatan kantor, dan lain-lain) di luar jasa giro. Giro PPO tersebut terdapat pada tujuh satker Poltekkes BLU dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27
Rincian Daftar PPO per Satker
(dalam rupiah)

Nama Satker	Nama Bank Mitra	Saldo Giro minimal mengendap	Saldo Rekening Per 31 Desember 2023
Poltekkes Bandung	Bank Tabungan Negara	10.000.000.000	10.481.709.195
Poltekkes Surabaya	Bank Tabungan Negara	22.100.000.000	22.752.823.885
Poltekkes Malang	Bank Tabungan Negara Cabang Syariah	12.000.000.000	14.092.066.898
Poltekkes Denpasar	Bank Tabungan Negara	6.000.000.000	7.294.416.552
Poltekkes Bengkulu	Bank Muamalat Indonesia	14.500.000.000	15.062.259.094
Poltekkes Kaltim	Bank Tabungan Negara Cabang Syariah	7.300.000.000	7.869.183.499
Poltekkes Tasikmalaya	Bank Jabar Syariah	9.730.469.988	3.061.148.839
Jumlah		94.630.469.988	80.613.607.962

Setara Kas Lainnya di BLU merupakan deposito jangka pendek yang jatuh tempo sampai dengan 3 bulan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Setara Kas Lainnya BLU per Satker TA 2023 dan 2023
(dalam rupiah)

Nama Satker	Tahun 2023	Tahun 2022
Poltekkes Jakarta II	30.803.344.116	36.301.380.941
Poltekkes Jakarta III	-	24.252.424.800
Poltekkes Bandung	12.000.000.000	9.066.145.993
Poltekkes Tasikmalaya	38.404.338.110	28.000.000.000
Poltekkes Semarang	30.000.000.000	47.500.000.000
Poltekkes Surakarta	91.000.000.000	84.000.000.000
Poltekkes Yogyakarta	14.000.000.000	6.443.288.274
Poltekkes Surabaya	-	30.000.000.000

Nama Satker	Tahun 2023	Tahun 2022
Poltekkes Medan	71.500.000.000	68.205.309.167
Poltekkes Bengkulu	26.537.281.332	33.718.113.056
Poltekkes Malang	30.000.000.000	16.500.000.000
Poltekkes Kalimantan Timur	20.500.000.000	17.500.000.000
Poltekkes Manado	36.281.256.570	7.819.873.193
Poltekkes Denpasar	30.000.000.000	15.000.000.000
Poltekkes Pontianak	8.000.000.000	6.000.000.000
Poltekkes Tanjungkarang	2.526.601.191	-
Poltekkes Banjarmasin	1.000.000.000	-
Poltekkes Kupang	45.478.821.446	-
Poltekkes Palangkaraya	4.042.561.906	-
Jumlah	492.074.204.671	430.306.535.424

*Investasi Jangka
Pendek BLU
Rp69.973.861.176*

C.5 Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum

Saldo Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum per tanggal per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp69.973.861.176,00 dan RpRp59.101.538.282,00. Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan Investasi Jangka Pendek yang dimaksudkan dalam rangka pengelolaan kelebihan kas yang belum digunakan dalam kegiatan Operasional BLU dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi berupa bunga maupun bagi hasil. Rincian Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum per satker disajikan sebagai berikut:

Tabel 29
Rincian Investasi Jangka Pendek BLU per Satker
(dalam rupiah)

Nama Satker	Tahun 2023	Tahun 2022	% Kenaikan (Penurunan)
Poltekkes Bandung	15.000.000.000	15.000.000.000	-
Poltekkes Tanjung Karang	-	8.089.209.515	(100,00)
Poltekkes Jakarta III	32.793.029.452	5.012.328.767	554,25
Poltekkes Denpasar	15.000.000.000	15.000.000.000	-
Poltekkes Kupang	-	16.000.000.000	(100,00)
Poltekkes Bengkulu	7.180.831.724	-	100,00
Jumlah	69.973.861.176	59.101.538.282	18,40

Saldo Investasi Jangka Pendek BLU per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp10.872.322.894,00 atau sebesar 18,40% dari saldo per 31 Desember 2022.

Belanja Dibayar di Muka
Rp3.059.441.328

C.6 Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp3.059.441.328,00 dan Rp12.928.464.546,00. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban dibayar di muka sebagai berikut:

Tabel 30
Perbandingan Belanja Dibayar Di Muka TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Kode Akun	Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022	%Penaikan (Penurunan)
114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka	86.579.027	93.866.667	(7,76)
114115	Belanja Modal Dibayar Di muka	2.972.862.301	12.834.597.879	(76,84)
	Jumlah	3.059.441.328	12.928.464.546	(76,34)

Saldo Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp9.869.023.218,00 atau sebesar 76,34% dari saldo per 31 Desember 2022.

Belanja Barang dibayar di Muka sebesar Rp86.579.027,00 terdapat pada Poltekkes Kalimantan Timur yang merupakan biaya atas langganan *E-Jurnal Konsorsium Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL)*, langganan *Plagiasi Checker*, dan sewa *Hosting Website*.

Belanja Modal dibayar di Muka sebesar Rp2.972.862.301,00 terdapat pada Poltekkes Semarang yang merupakan pembayaran 100% nilai pekerjaan Pembangunan Gedung

Science Techno Park (STP) yang sumber dana pembangunannya berasal dari dana BLU dengan menggunakan bank garansi karena pekerjaan belum selesai hingga tanggal neraca, 31 Desember 2023. Nilai Belanja Modal dibayar di Muka tersebut sebesar selisih nilai pembayaran senilai pekerjaan sebesar 100% dengan nilai progres pekerjaan per 31 Desember 2023 sebesar 93,563 %.

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima
Rp1.456.767.557*

C.7 Pendapatan yang Masih harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.456.767.557,00 dan Rp858.710.313,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Satker
(dalam rupiah)

Nama Satker	Tahun 2023	Tahun 2022	% Kenaikan (Penurunan)
Poltekkes Bengkulu	102.009.162	72.981.445	39,77
Poltekkes Medan	228.675.917	151.460.067	50,98
Poltekkes Tanjungkarang	3.044.520	69.317.606	(95,61)
Poltekkes Denpasar	58.401.382	36.917.806	58,19
Poltekkes Jakarta II	135.313.691	76.060.115	77,90
Poltekkes Jakarta III	39.462.236	27.348.851	44,29
Poltekkes Bandung	18.034.519	19.745.961	(8,67)
Poltekkes Tasikmalaya	126.944.750	12.801.370	891,65
Poltekkes Semarang	94.397.259	70.684.826	33,55
Poltekkes Surakarta	353.686.301	183.541.097	92,70
Poltekkes Yogyakarta	67.807.945	1.970.000	3.342,03
Poltekkes Kupang	8.793.682	18.410.958	(52,24)
Poltekkes Pontianak	14.613.699	630.968	2.216,08
Poltekkes Kalimantan Timur	24.751.370	15.956.093	55,12
Poltekkes Banjarmasin	2.783.562	-	100,00
Poltekkes Manado	114.331.727	13.973.220	718,22
Poltekkes Makassar	1.659.178	-	100,00

Nama Satker	Tahun 2023	Tahun 2022	% Kenaikan (Penurunan)
Poltekkes Malang	57.410.959	44.502.260	29,01
Poltekkes Surabaya	-	42.407.670	(100,00)
Poltekkes Palangkaraya	4.645.698	-	100,00
Jumlah	1.456.767.557	858.710.313	69,65

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp598.057.244,00 atau sebesar 69,65% dari saldo per 31 Desember 2022. Pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp1.456.767.557,00 terdiri dari :

- a. Pendapatan jasa layanan perbankan BLU berupa bunga deposito yang belum jatuh tempo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.389.292.642,00;
- b. Pendapatan hasil kerjasama dengan unit usaha pada Poltekkes Yogyakarta merupakan pendapatan KSO CV Poltek Usaha Mandiri Bulan Desember sebesar Rp63.660.000,00;
- c. Pengembalian Bunga Jasa Giro Bank BTN pada Poltekkes Kupang sebesar Rp964.915,00; dan
- d. Pendapatan sewa lahan ATM BTN yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum dilakukan pembayaran pada Poltekkes Kalimantan Timur sebesar Rp2.850.000,00.

Piutang PNPB
Rp239.576.697

C.8 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp239.576.697,00 dan Rp561.403.609,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Negara Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel 32
Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	%Kenaikan (Penurunan)
115211	Piutang PNB	9.600.000	43.350.000	(77,85)
115212	Piutang Lainnya	229.976.697	518.053.609	(55,61)
Jumlah		239.576.697	561.403.609	(57,33)

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp312.826.912,00 atau sebesar 57,33% dari saldo per 31 Desember 2022. Penurunan disebabkan adanya pembayaran piutang PNB dan piutang lainnya.

Piutang PNB tahun 2023 sebesar Rp9.600.000,00 terdapat di Poltekkes Maluku yang merupakan piutang mahasiswa selama dua semester yang saat ini sudah menjadi mahasiswa inaktif.

Piutang Lainnya di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan merupakan piutang yang timbul atas temuan pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah/(Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan) terhadap belanja barang dan belanja modal tahun anggaran yang lalu. Rincian Piutang Lainnya Per Satker disajikan sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Piutang Lainnya per Satker

(dalam rupiah)

Nama Satker	Tahun 2023	Tahun 2023
Poltekkes Padang	131.661.264	220.581.166
Poltekkes Malang	-	905.760
Poltekkes Maluku	30.813.559	30.813.559
Poltekkes Pangkal Pinang	67.501.874	67.501.874
Poltekkes Mamuju	-	198.251.250
Jumlah	229.976.697	518.053.609

Berikut penjelasan Piutang Lainnya per satker:

- a. Piutang Lainnya pada Poltekkes Padang sebesar Rp131.661.264,00 merupakan piutang atas kelebihan pembayaran honor sebagai hasil Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2019;
- b. Piutang Lainnya pada Poltekkes Maluku sebesar Rp30.813.559,00 merupakan temuan denda keterlambatan yang harus dibayarkan rekanan atas pengadaan seragam dan atribut atau perlengkapan mahasiswa;
- c. Piutang Lainnya pada Poltekkes Pangkal Pinang sebesar Rp67.501.874,00 merupakan temuan kelebihan pembayaran tenaga ahli atas Pembangunan Gedung Kuliah A pada Tahun Anggaran 2017.

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp12.000.000*

C.9 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp12.000.000,00 dan Rp12.000.000,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Kode Akun	Nama	Tahun 2023	Tahun 2022	%Kenaikan (Penurunan)
115411	Bagian Lancar Tagihan TP	12.000.000	12.000.000	-
Jumlah		12.000.000	12.000.000	-

Saldo Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan dibandingkan saldo per 31 Desember 2022. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan TA 2023 sebesar Rp12.000.000,00 terdapat di dua poltekkes yaitu Poltekkes Gorontalo dan Poltekkes Kendari masing-masing sebesar Rp6.000.000,00.

Piutang dari Kegiatan Operasional
1.397.223.000

C.10 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.397.223.000,00 dan Rp2.030.413.000,00. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU merupakan hak BLU terhadap pelayanan pendidikan dan penyediaan barang dan jasa lainnya yang telah diberikan kepada mahasiswa dan masyarakat dan belum diselesaikan pembayaran pada akhir tahun anggaran. Perbandingan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Perbandingan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
(dalam rupiah)

Kode Akun	Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022	%Kenaikan (Penurunan)
115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	1.397.223.000	2.030.413.000	(31,19)
Jumlah		1.397.223.000	2.030.413.000	(31,19)

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp633.190.000,00 atau sebesar 31,19% dari saldo per 31 Desember 2022. Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Satker

Nama Satker	2023	Tahun 2022
Poltekkes Jakarta II	26.150.000	21.500.000
Poltekkes Jakarta III	111.650.000	132.400.000
Poltekkes Bandung	89.800.000	92.000.000
Poltekkes Semarang	895.305.000	1.491.485.000
Poltekkes Surabaya	149.000.000	197.000.000
Poltekkes Bengkulu	12.800.000	-
Poltekkes Makassar	17.000.000	37.000.000
Poltekkes Manado	24.128.000	24.128.000
Poltekkes Mataram	33.000.000	-
Poltekkes Yogyakarta	38.390.000	34.900.000
Jumlah	1.397.223.000	2.030.413.000

*Piutang dari Kegiatan
Non Operasional BLU
Rp33.104.502*

C.11 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Saldo Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp33.104.502,00 dan Rp5.285.989,00. Berikut rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per satker:

Tabel 37
Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Kode Akun	Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022	%Kenaikan (Penurunan)
115813	Piutang Sewa Ruangan - BLU	13.953.488	5.285.989	163,97
115891	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	19.151.014	-	100,00
	Jumlah	33.104.502	5.285.989	526,27

Saldo Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp27.818.513,00 atau sebesar 164% dari saldo per 31 Desember 2022. Piutang Sewa Ruangan – BLU sebesar Rp13.953.488,00 terdapat pada Poltekkes Jakarta II yang merupakan pendapatan atas sewa lahan untuk ATM Bank

Jawa Barat yang hingga tanggal pelaporan belum dibayarkan.

Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp19.151.014,00 terdapat pada:

- a. Poltekkes Kupang sebesar Rp1.000.000,00 yang merupakan Piutang atas tagihan listrik dari kegiatan sewa ATM pada Bank BTN;
- b. Poltekkes Malang sebesar Rp10.620.000,00 merupakan Piutang atas pengadaan kalender Tahun 2023;
- c. Poltekkes Yogyakarta sebesar Rp431.015,00 merupakan Piutang atas pendapatan yang masih harus diterima dari CV Poltek Usaha Mandiri sebagai unit bisnis poltekkes;
- d. Poltekkes Makassar sebesar Rp7.100.000,00 merupakan koreksi atas piutang Publikasi Jurnal.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –Piutang
Lancar
(Rp292.087.389)*

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp292.087.389,00) dan (Rp77.077.858,00). Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Saldo Penyisihan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp77.077.858,00 atau sebesar 479% dari saldo per 31 Desember 2022. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 38**Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar**
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			-
Lancar	131.661.264	0,50%	658.306
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	67.501.874	50%	33.750.937
Macet	40.413.559	100%	40.413.559
Jumlah	239.576.697		74.822.802
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	12.000.000	0,50%	60.000
Jumlah	12.000.000		60.000
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU			
Lancar	1.142.873.000	0,50%	5.714.365
Kurang Lancar	6.000.000	10%	600.000
Diragukan	75.250.000	50%	37.625.000
Macet	173.100.000	100%	173.100.000
Jumlah	1.397.223.000		217.039.365
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU			
Lancar	33.104.502	0,50%	165.222
Jumlah	33.104.502		165.222
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	1.681.904.199		292.087.389

Persediaan
Rp29.119.824.972

C.13 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp29.119.824.972,00 dan Rp43.982.701.533,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 39
Perbandingan Persediaan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Kode Akun	Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022	% Kenaikan (Penurunan)
117111	Barang Konsumsi	23.035.678.019	33.086.590.981	(30,38)
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	805.476.684	1.630.873.439	(50,61)
117114	Suku Cadang	2.040.125.054	2.896.285.520	(29,56)
117131	Bahan Baku	2.627.937.143	5.513.330.329	(52,33)
117199	Persediaan Lainnya	610.608.072	855.621.264	(28,64)
Jumlah		29.119.824.972	43.982.701.533	(33,79)

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp14.862.876.561,00 atau sebesar 34% dari saldo per 31 Desember 2022. Berikut mutasi Persediaan per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	43.982.701.533
Mutasi tambah:		
Saldo Awal	Rp	1.306.800
Koreksi Kuantitas Tambah	Rp	8.012.400
Koreksi Nilai Tambah	Rp	4.252.514
Pembelian	Rp	62.986.265.867
Perolehan Lainnya	Rp	223.229.780
Reklasifikasi dari Aset	Rp	46.464.312.851
Reklasifikasi Masuk	Rp	3.365.434.837
Transfer Masuk	Rp	234.814.402
Hasil Opname Fisik	Rp	258.006.817
Mutasi kurang:		
Habis Pakai	Rp	(82.341.013.046)
Opname Fisik	Rp	(517.184.829)
Transfer Keluar	Rp	(13.200.000)
Usang	Rp	(584.767.892)
Keluar Lainnya	Rp	(12.500.098)
Koreksi Kuanitats Kurang	Rp	(33.075.080)
Koreksi Nilai Kurang	Rp	(1.488.297)
Reklasifikasi ke Aset	Rp	(41.539.848.750)
Reklasifikasi Keluar	Rp	(3.365.434.837)
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	29.119.824.972

Tanah

Rp11.014.249.686.625

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kesehatan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp11.014.249.686.625,00 dan Rp11.037.758.863.844,00.

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp23.509.177.219,00 atau sebesar 0.2% dari saldo per 31 Desember 2022. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	11.037.758.863.844
Mutasi tambah:		
Saldo Awal	Rp	5.131.735.000
Hibah Masuk	Rp	4.635.298.216
Koreksi Nilai Bertambah	Rp	7.774.709.251
Pengembangan dengan KDP	Rp	16.995.757.500
Pengembangan Nilai Langsung	Rp	187.804.152
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp	2.172.800.000
Reklasifikasi Masuk	Rp	299.436.071.000
Mutasi kurang:		
Hibah Keluar	Rp	(29.869.114.000)
Koreksi Pencatatan	Rp	(2.508.437.300)
Koreksi Nilai Berkurang	Rp	(28.029.730.038)
Reklasifikasi Keluar	Rp	(299.436.071.000)
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	11.014.249.686.625
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp	11.014.249.686.625

Pada Poltekkes Maluku terdapat mutasi bertambah Saldo Awal sebesar Rp2.070.935.000,00 merupakan hibah dari Pemerintah Daerah Maluku Tenggara pada Prodi Keperawatan Tual dengan sertifikat hak pakai No.00076. Pada Poltekkes Sorong terdapat mutasi bertambah Saldo Awal sebesar Rp3.060.800.000,00 merupakan hibah Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Fak-Fak berdasarkan Akta Hibah Nomor 153 Tahun 2010.

Peralatan dan Mesin
Rp4.143.550.526.219

C.15 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.143.550.526.219,00 dan Rp3.718.869.760.331,00. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

mengalami kenaikan sebesar Rp424.680.765.888,00 atau sebesar 11% dari saldo per 31 Desember 2022. Mutasi transaksi terhadap Peralatan dan Mesin per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp 3.718.869.760.331
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	Rp 4.795.254.781
Pembelian	Rp 435.307.325.998
Transfer Masuk	Rp 34.860.497.084
Hibah Masuk	Rp 3.669.878.984
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp 3.504.506.000
Reklasifikasi Masuk	Rp 33.810.940.788
Perolehan Lainnya	Rp 16.379.101.555
Perolehan Reklasifikasi dari Ekstra ke Intra	Rp 9.234.000
Pengembangan Nilai Langsung	Rp 1.637.579.461
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp 1.412.809.034
Koreksi Susulan	Rp 12.200.000
Penggunaan Aset Kembali	Rp 6.841.288.287
Internal Transfer Masuk	Rp 31.209.367.507
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp (618.775.007)
Transfer Keluar	Rp (1.410.378.334)
Reklasifikasi Keluar	Rp (33.810.940.788)
Koreksi Pencatatan	Rp (8.120.033.176)
Reklasifikasi ke Persediaan	Rp (4.848.026.943)
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp (68.751.695.836)
Internal Transfer Keluar	Rp (31.209.367.507)
Saldo per 31 Desember 2023	Rp 4.143.550.526.219
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp (935.012.893.600)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp 3.208.537.632.619

*Gedung dan
Bangunan
Rp5.674.420.006.864.*

C.16 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp5.674.420.006.864,00 dan Rp5.075.262.113.104,00. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp599.157.893.760,00 atau sebesar 11% dari saldo per 31 Desember 2022. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	5.075.262.113.104
Mutasi tambah:		
Saldo Awal	Rp	41.518.759.750
Pembelian	Rp	19.283.303.174
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	Rp	41.518.759.750
Hibah Masuk	Rp	467.046.040
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp	494.143.739.360
Reklasifikasi masuk	Rp	285.820.798.002
Perolehan Lainnya	Rp	626.811.576
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	568.314.192
Pengembangan Nilai Langsung	Rp	13.819.980.353
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp	57.316.970.432
Pengembangan Melalui KDP	Rp	166.387.270.607
Koreksi Manual	Rp	103.058.000
Koreksi Susulan	Rp	2.173.710.010
Penggunaan Kembali	Rp	133.492.000
Transfer Masuk Internal	Rp	46.938.631.393
Mutasi kurang:		
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp	(76.292.938.152)
Reklasifikasi Keluar	Rp	(285.919.798.002)
Koreksi Pencatatan	Rp	(60.786.984.406)
Reklasifikasi ke Persediaan	Rp	(41.518.759.750)
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	(48.253.789.676)
Hibah Keluar	Rp	(11.951.849.500)
Transfer Keluar Internal	Rp	(46.938.631.393)
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	5.674.420.006.864
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp	(935.012.893.600)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp	4.739.407.113.264

Penjelasan mutasi tambah dari Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp494.143.739.360,00 diantaranya merupakan pekerjaan konstruksi fisik yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2023 pada Poltekkes Surabaya sebesar Rp2.826.344.886,00 yang pembayarannya melalui mekanisme rekening penampungan BLU.

Reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar sebesar Rp285.820.798.002,00 karena adanya kesalahan klasifikasi BMN pada perekaman sebelumnya dan kesalahan input kodefikasi pada modul komitmen.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp120.193.170.572

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp120.193.170.572,00 dan Rp115.717.935.971,00. Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.475.234.601,00 atau sebesar 4% dari saldo per 31 Desember 2022. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	115.717.935.971
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	Rp -
Pembelian	Rp 374.138.357
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp 139.500.000
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp 3.149.649.700
Pengembangan dengan KDP	Rp 1.250.777.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp 193.428.000
Mutasi kurang:	
Hibah Keluar	Rp (183.852.000)
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp (448.406.456)
Saldo per 31 Desember 2023	120.193.170.572
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(53.017.427.545)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	67.175.743.027

Aset Tetap Lainnya
Rp103.704.056.069

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp103.704.056.069,00 dan Rp99.567.151.666,00. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.136.904.403,00 atau sebesar 4% dari saldo per 31 Desember 2022. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	99.567.151.666
Mutasi tambah:	
Pembelian	4.086.662.426
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	16.089.000
Hibah Masuk	47.086.477
Reklasifikasi Masuk	374.220.400
Perolehan Lainnya	275.220.400
Penggunaan Aset Kembali	35.200.000
Transfer Masuk Internal	204.714.500
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(2.583.000)
Transfer Keluar	(275.220.400)
Koreksi Pencatatan	(375.000.400)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(44.770.500)
Transfer Keluar Internal	(204.714.500)
Saldo per 31 Desember 2023	103.704.056.069
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(2.137.145.661)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	101.566.910.408

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp560.359.618.560*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp560.359.618.560,00 dan Rp400.684.191.646,00 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp159.675.426.914,00 atau sebesar 40% dari saldo per 31 Desember 2022. Mutasi transaksi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	Rp 400.684.191.646
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	Rp 31.535.451.942
Pengembangan KDP	Rp 788.665.782.788
Koreksi Nilai KDP Bertambah	Rp 77.530.776.403
Perolehan Lainnya KDP	Rp 8.554.795.797
Transfer Masuk Internal KDP	Rp 3.948.368.212
Reklasifikasi Keluar KDP	Rp 2.458.027.738
Mutasi kurang:	
Penghapusan/Penghentian KDP	Rp (2.594.955.515)
Transfer Keluar Internal KDP	Rp (3.948.368.212)
Reklasifikasi Keluar KDP	Rp (2.458.027.738)
Koreksi Pencatatan KDP	Rp (39.062.346.038)
Koreksi Nilai KDP Berkurang	Rp (20.359.727.996)
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	Rp (684.594.350.467)
Saldo per 31 Desember 2023	Rp 560.359.618.560
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp -
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp 560.359.618.560

Terdapat Pengembangan KDP pada Poltekkes Semarang Semarang yang merupakan pekerjaan Pembangunan Gedung Science Techno Park (STP) yang sumber dana pembangunannya berasal dari dana BLU. Telah dilakukan pembayaran 100% atau senilai Rp7.389.435.579,00 menggunakan mekanisme Bank Garansi. Progres pekerjaan per 31 Desember 2023 sebesar 93,563 % atau Rp43.211.110.069,00 dari total kontrak senilai 46.183.972.370,00.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp4.149.968.456.168*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp4.149.968.456.168,00 dan Rp3.718.869.760.331,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan

kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp431.098.695.837,00 atau sebesar 12% dari saldo per 31 Desember 2022. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini

Tabel 40
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.143.550.526.219	3.159.843.729.816	983.706.796.403
2	Gedung dan Bangunan	5.674.420.006.864	934.970.153.146	4.739.449.853.718
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	120.193.170.572	53.017.427.545	67.175.743.027
4	Aset Tetap Lainnya	103.704.056.069	2.137.145.661	101.566.910.408
Total		10.041.867.759.724	4.149.968.456.168	5.891.899.303.556

Tagihan TP/TGR
Rp4.937.522.766

C.21 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.937.522.766,00 dan Rp4.952.022.766,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 41
Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022	% Kenaikan (Penurunan)
Poltekkes Kendari	67.108.256	73.108.256	(8,21)
Poltekkes Gorontalo	4.870.414.510	4.878.914.510	(0,17)
Jumlah	4.937.522.766	4.952.022.766	(0,29)

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan dari saldo per 31 Desember 2022.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan TP/TGR (Rp271.316.874)

C.22 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Non Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp271.316.874,00) dan (Rp271.626.874,00). Penyisihan Piutang tak Tertagih–Piutang Non Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Saldo Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp310.000,00 atau sebesar 0,11% dari saldo per 31 Desember 2022. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Tabel 42
Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Tagihan TP/TGR
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	2.341.425.591	0,50%	11.707.126
Kurang Lancar	2.596.097.475	10%	259.609.748
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	4.937.523.066		271.316.874
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	4.937.523.066		271.316.874

Aset Tak Berwujud
Rp37.777.621.745

C.23 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp37.777.621.745,00 dan Rp57.401.964.723,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 43
Perbandingan Aset Tak Berwujud TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	% Kenaikan (Penurunan)
162121	Hak Cipta	13.200.000	13.200.000	-
162141	Paten	7.100.000	6.700.000	5,97
162151	Software	36.411.382.711	56.171.125.689	(35,18)
162161	Lisensi	-	198.900.000	(100,00)
162191	ATB Lainnya	1.345.939.034	1.012.039.034	32,99
Total		37.777.621.745	57.401.964.723	(34,19)

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp19.624.342.978,00 atau sebesar 34% dari saldo per 31 Desember 2022. Berikut mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	57.401.964.723
Mutasi tambah:	
Pembelian	2.213.273.480
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	5.000.000
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	788.000.000
Reklasifikasi Masuk	275.220.400
Pengembangan Nilai Langsung	594.489.360
Penggunaan Aset Kembali	1.191.958.150
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	746.499.700
Perolehan/Penambahan KDP	236.400.000
Pengembangan KDP	551.600.000
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	(275.220.400)
Koreksi Pencatatan	(2.455.865.330)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(22.707.698.338)
Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi	(788.000.000)
Saldo per 31 Desember 2023	37.777.621.745
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(55.175.670.241)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	(17.398.048.496)

Terdapat mutasi penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif di Ditjen Nakes sebesar Rp1.191.958.150,00 merupakan perbaikan data kesalahan input menu dalam Modul Aset Tetap pada Poltekkes Banten sebesar Rp508.328.150,00; perbaikan kesalahan klasifikasi status barang yang sudah dihentikan penggunaannya pada Kantor Pusat Ditjen Nakes sebesar Rp99.990.000,00; penggunaan kembali aset tak berwujud pada Poltekkes Tanjungpinang sebesar Rp39.500.000,00; dan kesalahan koreksi pada Poltekkes Jayapura sebesar Rp544.140.000,00.

*Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp114.654.643.310*

C.24 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp114.654.643.310,00 dan Rp0,00. Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp114.654.643.310,00 atau sebesar 100% dari saldo per 31 Desember 2022. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Dana di Rekening

Penampungan-Kementerian/Lembaga pada satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang memiliki pekerjaan lintas tahun dan pekerjaan yang selesai sebelum tanggal neraca tetapi SP2Dnya terbit setelah tanggal neraca. Berikut rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya:

Tabel 44
Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per Satker per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Keterangan	Nilai
BBPK Makassar	424.953.124
BPPK Jakarta	88.600.000
Bapelkes Cikarang	1.186.327.319
Poltekkes Gorontalo	403.713.800
Bapelkes Mataram	16.227.680.287
Kantor Pusat Ditjen Nakes	22.905.430.196
Poltekkes Medan	2.548.683.471
Poltekkes Padang	832.404.387
Poltekkes Riau	8.281.304.215
Poltekeks Bengkulu	645.972.000
Poltekkes Palembang	3.220.761.375
Poltekkes Tanjungkarang	3.569.688.819
Poltekkes Jakarta I	2.589.536.978
Poltekkes Jakarta III	456.698.222
Poltekeks Semarang	8.144.208.240
Poltekkes Surakarta	325.896.152
Poltekkes Jogjayakrta	4.512.968.668
Poltekkes Palu	5.147.960.501
Poltekkes Kendari	2.137.490.200
Poltekkes Malang	1.708.038.108
Poltekkes Palangkaraya	280.870.000
Poltekkes Surabaya	4.447.758.740
Poltekkes Aceh	3.759.879.450
Poltekkes Maluku	1.112.500.000
Poltekkes Ternate	2.064.384.594
Poltekkes Pangkal Pinang	11.381.706.591
Poltekkes Tanjung Pinang	5.252.021.353
Poltekkes Mamuju	850.488.520
Poltekkes Sorong	146.718.000
Jumlah	114.654.643.310,000

Aset Lain-Lain
Rp625.856.238.217

C.25 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp625.856.238.217,00 dan Rp594.496.288.660,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan serta dalam proses penghapusan dari BMN. Aset Lain-lain terdiri dari:

Tabel 45
Perbandingan Aset Lain-lain TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	% Kenaikan (Penurunan)
166112	Aset Tetap yang Tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	607.897.734.119	594.134.611.582	2,32
166113	Aset Tak Berwujud yang Tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	17.958.504.098	361.677.078	4.865,34
Total		625.856.238.217	594.496.288.660	5,28

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp31.359.949.557,00 atau sebesar 5,28% dari saldo per 31 Desember 2022. Berikut mutasi Aset Tetap yang Tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	594.134.611.582
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Tetap Lain	117.498.662.468
Transfer Masuk Henti Guna	683.394.000
Transfer Masuk Internal	18.575.000
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Tetap Lain	(7.009.980.287)
Penghapusan	(501.527.627)
Pencatatan Barang yang akan Dihapuskan	(90.924.627.830)
Transfer Keluar Internal	(18.575.000)
Likuidasi Keluar Henti Guna	(683.394.000)
Transfer Keluar Henti Guna	(5.299.404.187)
Saldo per 31 Desember 2023	607.897.734.119
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(561.487.679.319)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	46.410.054.800

Berikut mutasi Aset Tak Berwujud yang Tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	361.677.078
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Tetap Lain	22.707.698.338
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Tetap Lain	(1.191.958.150)
Penghapusan	(16.940.000)
Pencatatan Barang yang akan Dihapuskan	(3.901.973.168)
Saldo per 31 Desember 2023	17.958.504.098
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(17.809.749.286)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	148.754.812

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Lainnya
Rp611.987.220.895*

C.26 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp611.987.220.895,00 dan Rp616.164.959.045,00. Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.177.738.150,00 atau sebesar 0.68% dari saldo per 31

Desember 2022. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 46
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Hak Cipta	13.200.000	704.000	12.496.000
2	Paten	7.100.000	1.755.000	5.345.000
3	Software	36.411.382.711	32.687.333.290	3.724.049.421
4	Lisensi	-	-	-
5	ATB Lainnya	1.345.939.034	-	1.345.939.034
Jumlah		37.777.621.745	32.689.792.290	5.087.829.455
B	Aset Lainnya			-
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	607.897.734.119	561.487.679.319	46.410.054.800
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	17.958.504.098	17.809.749.286	148.754.812
Jumlah		625.856.238.217	579.297.428.605	46.558.809.612
Total		663.633.859.962	611.987.220.895	51.646.639.067

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.27 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp287.693.157,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp101.823.632.120

C.27 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp101.823.632.120,00 dan

Rp74.158.653.584,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Rincian Saldo Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 47
Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	% Kenaikan (Penurunan)
212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	1.215.451.896	1.148.248.560	5,85
212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	4.546.489.124	61.176.117.332	(92,57)
212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	6.307.671.593	3.323.787.916	89,77
212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	85.556.604.105	8.163.588.000	948,03
212192	Dana Pihak Ketiga	243.656.422	-	100,00
212193	Dana Pihak Ketiga BLU	3.953.758.980	346.911.776	1.039,70
Total		101.823.632.120	74.158.653.584	37,31

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp24.664.978.536,00 atau sebesar 37% dari saldo per 31 Desember 2022. Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 pada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp1.215.451.896,00 merupakan kewajiban yang timbul akibat hak atas pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang ditetapkan dan belum dibayarkan hingga akhir periode pelaporan. Rincian perbandingan Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 48
Perbandingan Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar
(dalam rupiah)

Nama Satker	Tahun 2023	Tahun 2022
BPPK Ciloto	24.209.000	28.002.000
Poltekkes Tasikmalaya		115.349.000
Poltekkes Mataram	442.119.396	501.022.174
Poltekkes Manado		46.663.000
Poltekkes Palu	-	53.606.036
Poltekkes Kendari	-	79.444.000
Poltekkes Banten	-	37.410.000
Poltekkes Tanjung Pinang	-	21.516.000
Poltekkes Medan	180.797.000	-
Poltekkes Palembang	57.962.200	265.236.350
Poltekkes Surakarta	20.176.000	-
Poltekkes Kupang	92.655.000	-
Poltekkes Banjarmasin	101.093.300	-
Poltekkes Manado	102.597.000	-
Poltekkes Palu	93.428.000	21.516.000
Poltekkes Banten	29.426.000	-
Poltekkes Pangkal Pinang	36.226.000	-
Poltekkes Tanjung Pinang	34.763.000	21.516.000
Jumlah	1.215.451.896	1.191.280.560

2. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp4.546.489.124,00 merupakan kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pelunasan /pembayaran kepada penyedia barang. Rincian perbandingan Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 49
Perbandingan Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar
(dalam rupiah)

Nama Satker	Tahun 2023	Tahun 2022
Bapelkes Makassar	30.732.932	22.876.850
Bapelkes Batam	168.871.380	143.955.231
Bapelkes Semarang	162.946.698	169.121.863
BPPK Jakarta	132.060.492	133.997.719
Bapelkes Cikarang	79.242.929	60.561.945
BPPK Ciloto	50.832.596	59.066.842
Poltekkes Gorontalo	54.448.620	46.788.366
Kantor Pusat Ditjen Nakes	403.159.189	57.380.039.680
Poltekkes Medan	366.315.794	236.337.141
Poltekkes Padang	10.017.490	3.837.100
Poltekkes Pekanbaru	59.598.021	61.647.955
Poltekkes Jambi	-	83.335.574
Poltekkes Bengkulu	100.588.383	98.613.873
Poltekkes Palembang	162.727.058	194.740.597
Poltekkes Tanjungkarang	96.740.775	83.285.633
Poltekkes Denpasar	94.682.275	91.392.776
Poltekkes Jakarta I	117.414.298	98.796.530
Poltekkes Jakarta II	236.100.654	232.457.489
Poltekkes Jakarta III	191.020.849	208.768.720
Poltekkes Bandung	119.966.165	97.620.089
Poltekkes Tasikmalaya	51.462.250	5.999.790
Poltekkes Semarang	262.498.022	254.088.603
Poltekkes Surakarta	179.899.378	164.057.733
Poltekkes Yogyakarta	138.293.161	111.618.784
Poltekkes Mataram	73.950.400	72.617.677
Poltekkes Kupang	109.886.161	108.622.831
Poltekkes Pontianak	43.059.510	47.592.379
Poltekkes Kaltim	198.014.129	206.541.690
Poltekkes Banjarmasin	14.854.600	29.992.393
Poltekkes Manado	79.895.494	72.271.342
Poltekkes Makassar	83.831.588	86.345.881
Poltekkes Kendari	-	37.931.135
Poltekkes Malang	95.184.806	92.022.481
Poltekkes Palangkaraya	78.334.039	106.534.409
Poltekkes Surabaya	6.617.050	26.327.810
Poltekkes Aceh	100.769.074	-
Poltekkes Ternate	14.415.000	20.522.000
Poltekkes Banten	195.014.727	83.238.054
Poltekkes Pangkal Pinang	30.585.996	30.979.497
Poltekkes Tanjung Pinang	3.179.533	3.048.633
Poltekkes Mamuju	34.166.020	26.169.790
Poltekkes Sorong	115.111.588	82.352.447
Jumlah	4.546.489.124	61.176.117.332

Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan merupakan tagihan air, listrik, dan telepon bulan Desember.

3. Utang kepada Pihak Ketiga BLU sebesar Rp6.307.671.593,00 merupakan pembayaran remunerasi pegawai dan uang makan bulan Desember yang pembayarannya belum dilaksanakan hingga tanggal neraca. Berikut perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga BLU:

Tabel 50
Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga BLU
(dalam rupiah)

Nama Satker	Tahun 2023	Tahun 2022
Poltekkes Jakarta II	2.088.869.862	388.630.172
Poltekkes Jakarta III	406.607.730	1.245.072.825
Poltekkes Surabaya	1.780.228.887	1.690.084.919
Poltekkes Padang	501.612.939	-
Poltekkes Maluku	1.496.528.369	-
Poltekeks Banten	11.975.409	1.690.084.919
Poltekkes Medan	21.848.397	-
Jumlah	6.307.671.593	5.013.872.835

4. Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp85.556.604.105,00 terdiri dari:
 - a. kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang timbul setelah tanggal neraca dan atas pekerjaan yang sudah selesai pelaksanaannya per 31 Desember 2023 dengan progres 100% tetapi SP2D terbit setelah tanggal neraca terdapat pada 26 satker sebesar Rp82.175.708.365,00;
 - b. Beasiswa GAKIN yang dananya masih ada di Poltekkes dan akan dibayarkan ke mahasiswa tahun 2024 pada Poltekkes Jayapura sebesar Rp152.000.000,00;

- c. Dana Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) yang masih ada di PPSPM dan akan disalurkan tahun 2024 pada Poltekkes Jayapura sebesar Rp137.000.000,00; dan
 - d. Remunerasi pegawai Tugas Belajar Tahun 2023 yang belum dibayarkan hingga tanggal 31 Desember 2023 pada Poltekkes Malang sebesar Rp3.228.895.740,00.
5. Dana Pihak Ketiga sebesar Rp243.656.422,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pada Poltekkes Medan sebesar Rp9.986.422,00 merupakan Dana titipan kegiatan perceptor mentor dari pihak luar Rp10.000.000,00, sebesar Rp11.422,00 merupakan pendapatan bunga dari Bank BSI Bulan Desember yang belum disahkan hingga tanggal 31 Desember 2023 , dan sebesar Rp25.000,00 merupakan biaya yang terpotong oleh bank sebagai biaya administrasi yang akan dikembalikan di Bulan Januari 2024; dan
 - b. Pada Poltekkes Jayapura sebesar Rp3.300.000,00 merupakan kas tunai berupa dana bantuan pendidikan mahasiswa dari Pemprov Papua sebesar Rp3.000.000,00 yang belum disalurkan kepada mahasiswa terkait serta sebesar Rp230.370.000,00 yang merupakan dana bantuan pendidikan mahasiswa dari Boven Dogel yang belum disalurkan kepada mahasiswa terkait.
6. Dana Pihak Ketiga Lainnya-BLU sebesar Rp3.953.758.980,00 terdapat di dua satker, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51
Perbandingan Dana Pihak Ketiga Lainnya-BLU
(dalam rupiah)

Nama Satker	Tahun 2023	Tahun 2022
Poltekkes Denpasar	-	37.506.678
Poltekkes Manado	577.750.000	309.405.098
Poltekkes Surabaya	3.376.008.980	309.405.098
Jumlah	3.953.758.980	656.316.874

- a. Poltekkes Manado sebesar Rp577.750.000,00 merupakan uang yang berada di rekening dana kelolaan terdiri dari uang asrama dan biaya hidup mahasiswa Bintuni dan Papua, uang sewa toga yang akan dibayarkan ke rekanan, uang makan mahasiswa di asrama yang akan dibayarkan ke rekanan, uang pengelolaan asrama.
- b. Poltekkes Surabaya sebesar Rp3.376.008.980,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Terdapat tiga pekerjaan pada akhir tahun anggaran yang pembayarannya menggunakan sumber dana BLU melalui mekanisme rekening penampungan sebesar Rp3.320.077.980;
 2. Terdapat biaya admin VA BNI sebesar 2.956.000,00 yang belum di debet oleh pihak bank per 31 Desember 2023;
 3. Terdapat dana bantuan Pendidikan Mahasiswa Papua Selatan yang belum dicairkan dan disetorkan sebesar Rp16.600.000,00 per 31 Desember 2023;
 4. Terdapat uang tunai di Bendahara sebesar Rp36.375.000,00 per 31 Desember 2023 terkait dana pengembalian Beasiswa GAKIN.

Utang kepada Pihak
Ketiga II Rp0

C.28 Utang Kepada Pihak Ketiga II

Nilai Utang Pihak Ketiga II per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar R0,00 dan Rp46.732.145.487,00.

Pendapatan Diterima
di Muka
Rp72.469.573.988

C.29 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp72.469.573.988,00 dan Rp69.476.915.690,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka disajikan sebagai berikut:

Tabel 52
Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	% Kenaikan (Penurunan)
219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	284.211.539	292.226.142	(2,74)
219212	Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka	2.400.000	4.222.788.333	(99,94)
219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	72.182.962.449	64.961.901.215	11,12
	Jumlah	72.469.573.988	69.476.915.690	4,31

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.992.658.298,00 atau sebesar 4,31% dari saldo per 31 Desember 2022. Pendapatan Sewa Diterima Di Muka sebesar Rp257.024.039,00 bersumber dari optimalisasi aset atau penyewaan aset dari satuan kerja, namun jasanya belum selesai diberikan hingga akhir periode pelaporan. Pendapatan Diterima Di Muka per satker disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 53
Rincian Pendapatan Sewa Diterima Di Muka per Satker
(dalam rupiah)

Nama Satker	Tahun 2023	Tahun 2022
Bapelkes Batam	76.114.610	36.472.334
Bapelkes Semarang	11.260.167	23.831.167
BPPK Jakarta	42.911.329	83.242.667
Bapelkes Cikarang	10.216.934	10.558.750
BPPK Ciloto	26.585.584	13.228.050
Kantor Pusat Ditjen Nakes	51.751.730	48.666.230
Poltekkes Pekan Baru	25.174.500	-
Poltekkes Padang	-	14.729.250
Poltekkes Banjarmasin	16.542.944	30.722.611
Poltekkes Kendari	-	30.775.083
Poltekkes Jambi	19.153.741	-
Poltekkes Tanjung Pinang	4.500.000	30.775.083
Total	284.211.539	323.001.225

Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka sebesar Rp2.400.000,00 terdapat pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan merupakan penerimaan setoran dari Surat Tanda Registrasi (STR) pada tahun 2023 pada Unit Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia.

Tabel 54
Rincian Pendapatan Diterima di Muka BLU per Satker
(dalam rupiah)

Nama Satker	Tahun 2023	Tahun 2022
Poltekkes Medan	129.141.667	116.575.000
Poltekkes Bengkulu	160.730.670	161.300.000
Poltekkes Tanjungkarang	19.245.101.407	17.611.626.917
Poltekkes Jakarta II	2.735.993.715	2.468.285.844
Poltekkes Jakarta III	7.034.655.922	6.342.319.990
Poltekkes Bandung	757.751.316	668.308.332
PoltekkesTasikmalaya	15.750.000	2.176.303.333
Poltekkes Semarang	19.416.667	27.416.667
Poltekkes Surakarta	216.000.000	108.000.000
Poltekkes Yogyakarta	22.965.160.000	18.623.373.333
Poltekkes Kupang	31.500.000	4.931.633.333
Poltekkes Pontianak	7.140.988.333	5.983.493.333
Poltekkes Kaltim	1.465.626.622	500.681.739
Poltekkes Manado	81.060.600	30.681.810
Poltekkes Makassar	604.183.863	152.484.917
Poltekkes Malang	63.750.000	63.666.667
Poltekkes Surabaya	5.731.125.000	4.995.750.000
Poltekkes Palembang	3.404.726.667	-

Nama Satker	Tahun 2023	Tahun 2022
Poltekkes Jambi	380.300.000	-
Total	72.182.962.449	64.961.901.215

Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp127.648.759

C.30 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp127.648.759,00 dan Rp1.940.550,00. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp125.708.209,00 atau sebesar 6,478% dari saldo per 31 Desember 2022. Utang Jangka Pendek Lainnya terdapat pada Poltekkes Banten yang merupakan Utang Pajak Bendahara BLU yang belum disetor ke kas negara hingga tanggal pelaporan.

Ekuitas
Rp18.344.061.576

C.31 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp18.344.360.061.576,00 dan Rp17.368.156.846.181,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp976.203.215.395,00 atau sebesar 5,62% dari saldo per 31 Desember 2022. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Tabel 55
Perbandingan Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	% Kenaikan (Penurunan)
Ekuitas	18.344.360.061.576	17.368.156.846.181	5,62
	18.344.360.061.576	17.368.156.846.181	5,62

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB
Rp1.346.424.036.733

D.1 Pendapatan Operasional

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.346.424.036.733,00 dan Rp1.180.944.825.834,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 56
Rincian Pendapatan TA 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	% Kenaikan (Penurunan)
	Pendapatan Jasa Layanan Umum			
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	976.383.477.587	789.411.350.605	23,69
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	17.844.074.977	17.684.380.145	0,90
	Jumlah Pendapatan Jasa Layanan Umum	994.227.552.564	807.095.730.750	23,19
	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum			
424231	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri Perorangan Barang/Jasa	-	35.000.000	(100,00)
424233	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Barang / Jasa	293.260.000	-	100,00
424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa	369.977.377	-	100,00
424242	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa	2.632.016.124	2.562.305.367	100,00
424243	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Barang/jasa	418.216	26.057.404.147	(100,00)
	Jumlah Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	3.295.671.717	28.654.709.514	(88,50)
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU			
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	148.367.400	45.422.263	226,64
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	11.449.117.383	5.331.529.217	114,74
	Jumlah Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	11.597.484.783	5.376.951.480	115,69
	Pendapatan dari Alokasi APBN			
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	587.060.000	213.600.000	174,84
	Pendapatan dari Alokasi APBN	587.060.000	213.600.000	174,84
	Pendapatan BLU Lainnya			
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	37.317.623.383	21.012.132.874	77,60
424919	Pendapatan lain-lain BLU	5.059.403.559	1.322.552.597	282,55
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	572.656.918	464.733.300	23,22
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	4.389.235.129	1.405.385.000	212,32
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	9.142.859.626	4.439.093.676	105,96
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	1.254.657.000	608.874.468	106,06
424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	17.575.000	34.999.998	(49,79)

Kode Akun	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	% Kenaikan (Penurunan)
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	405.064.578	18.412.000	2.100,00
424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU	929.583.672	-	-
	Jumlah Pendapatan BLU Lainnya	59.088.658.865	29.306.183.913	101,63
	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha			
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	1.430.000	-	100,00
	Jumlah Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	1.430.000	-	100,00
	Pendapatan dari Penjualan Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha			
425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	807.852.542	612.695.923	31,85
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	32.751.860	5.931.334	452,18
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	3.471.405.000	1.577.495.000	120,06
	Jumlah Pendapatan dari Penjualan Pengelolaan BMN dan	4.312.009.402	2.196.122.257	96,35
	Pendapatan Kesehatan Perlindungan Sosial dan Keagamaan			
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	13.305.000	-	-
425316	Pendapatan Registrasi Tenaga Kesehatan	91.173.440.000	71.834.050.000	26,92
	Jumlah Pendapatan Kesehatan Perlindungan Sosial dan	91.186.745.000	71.834.050.000	26,94
	Pendapatan Pendidikan Budaya riset dan Teknologi			
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	3.495.194.100	4.788.193.609	(27,00)
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	150.788.774.300	216.606.184.366	(30,39)
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	269.368.500	854.807.000	(68,49)
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	23.757.554.000	12.863.714.018	84,69
	Jumlah Pendapatan Pendidikan Budaya riset dan Teknologi	178.310.890.900	235.112.898.993	(24,16)
	Pendapatan Jasa			
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	2.400.000	-	-
	Jumlah Pendapatan Jasa	2.400.000	-	-
	Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan			
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	4.208.700	2.690.656	56,42
	Jumlah Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening	4.208.700	2.690.656	56,42
	Pendapatan Denda			
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	3.804.169.602	1.151.517.941	230,36
	Jumlah Pendapatan Iuran dan Denda	3.804.169.602	1.151.517.941	230,36
	Pendapatan Lain-Lain			
425999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	5.755.200	370.330	1.454,07
	Jumlah Pendapatan Lain-Lain	5.755.200	370.330	1.454,07
	Jumlah	1.346.424.036.733	1.180.944.825.834	14,01

Terdapat Perbedaan nilai Pendapatan yang tersaji pada Laporan Operasional (LO) dengan nilai Pendapatan yang tersaji di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disebabkan nilai Pendapatan di LO antara lain dipengaruhi oleh nilai:

1. Pendapatan Diterima di Muka tahun 2023 dan 2022;
2. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima tahun 2023 dan 2022;
3. Piutang tahun 2023 dan 2022; dan
4. Pendapatan yang timbul karena adanya transaksi hibah barang di Poltekkes BLU di mana penambahan pendapatan hibah hanya mempengaruhi nilai pendapatan di LO namun tidak menambah nilai Pendapatan di LRA. Rincian nilai Pendapatan Hibah pada Poltekkes BLU per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 57
Rincian Pendapatan Hibah BLU TA 2023

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Nama Satker	Nilai
424233	Pendapatan Hibah	Poltekkes Surabaya	293.260.000
Total 424231			293.260.000
424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa	Poltekkes Bengkulu	2.175.000
		Poltekkes Palembang	113.162.377
		Poltekkes Bandung	24.300.000
		Poltekkes Semarang	10.340.000
		Poltekkes Makassar	220.000.000
Total 424241			369.977.377
424242	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa	Poltekkes Jakarta II	126.510.000
		Poltekkes Jakarta III	24.220.000
		Poltekkes Bandung	590.970.000
		Poltekkes Tasikmalaya	174.000.000
		Poltekkes Semarang	267.530.084
		Poltekkes Yogyakarta	174.000.000
		Poltekkes Surabaya	174.000.000
		Poltekkes Jambi	87.000.000
		Poltekkes Palembang	347.786.040
		Poltekkes Pontianak	16.000.000
		Poltekkes Manado	174.000.000
		Poltekkes Kupang	476.000.000
Total 424242			2.632.016.124
424243	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Barang / Jasa	Poltekkes Pontianak	418.216
Total 424243			418.216
Total Pendapatan Hibah BLU			3.295.671.717

Beban Operasional

Jumlah beban operasional untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.980.795.112.375,00.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp1.354.927.435.335

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.354.927.435.335,00 dan Rp1.383.267.661.834,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Perbedaan nilai Beban Pegawai di LO dan Belanja Pegawai di LRA disebabkan Belanja Gaji BLU yang diperhitungkan sebagai beban Pegawai.

Tabel 58
Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian	Realisasi Beban		% Kenaikan (Penurunan)
		Tahun 2023	Tahun 2022	
511111	Beban Gaji Pokok PNS	441.350.258.573	466.960.139.361	(5,48)
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	5.891.937	6.524.601	(9,70)
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	30.094.095.349	31.965.052.148	(5,85)
511122	Beban Tunj. Anak PNS	8.356.148.695	8.932.939.730	(6,46)
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	831.450.000	1.667.295.700	(50,13)

Kode Akun	Uraian	Realisasi Beban		% Kenaikan (Penurunan)
		Tahun 2023	Tahun 2022	
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	50.431.438.184	50.938.939.902	(1,00)
511125	Beban Tunj. PPh PNS	3.477.262.350	3.478.713.404	(0,04)
511126	Beban Tunj. Beras PNS	22.216.701.358	23.962.696.321	(7,29)
511129	Beban Uang Makan	60.162.434.941	66.696.308.689	(9,80)
511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	19.100.000	20.550.000	(7,06)
511137	Beban Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk Mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana PNS	10.400.000	170.137.100	(93,89)
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	1.424.725.000	1.433.075.000	(0,58)
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	7.254.969.255	8.839.909.892	(17,93)
511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	155.590.364.212	155.849.274.097	(0,17)
511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	1.410.722.700	571.678.600	146,77
511156	Beban Tunjangan Khusus Guru/Dosen	25.300.000	31.850.000	(20,57)
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	4.129.151.000	38.564.500	10.607,13
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	41.822	943	4.334,99
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	209.679.840	3.856.450	5.337,12
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	52.993.898	-	100,00
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	582.075.000	3.900.000	14.825,00
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	220.011.760	1.882.920	11.584,60
511628	Beban Uang Makan PPPK	965.531.000	3.811.000	25.235,37
511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	14.675.000	-	100,00
511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	10.825.000	-	100,00
512211	Beban Uang Lembur	8.528.195.900	11.528.270.600	(26,02)
512212	Beban Uang Lembur PPPK	75.157.000	-	100,00
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	207.846.582.298	240.309.164.941	(13,51)
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.243.559.240	54.659.309	2.175,11
525111	Beban Gaji dan Tunjangan	348.387.694.023	309.798.466.626	12,46
Jumlah		1.354.927.435.335	1.383.267.661.834	(2,05)

Nilai realisasi Beban Pegawai tahun 2023 turun 2,05% dibandingkan tahun 2022. Hal-hal penting terkait realisasi Beban Pegawai antara lain :

1. Penurunan beberapa komponen Beban Pegawai disebabkan pergantian Satuan Kerja yang membayarkan gaji pegawai di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan ke Eselon I Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
2. Realisasi beban gaji dan tunjangan PPPK mengalami kenaikan karena terdapat tambahan enam satker yang membayarkan Beban gaji dan tunjangan PPPK pada tahun 2023 setelah pada tahun 2022 hanya satu satker saja. Satker yang membayarkan tahun 2023 adalah BBPK Makassar, Poltekkes Jakarta I, Poltekkes Semarang, Poltekkes Yogyakarta, Poltekkes Kalimantan Timur dan Poltekkes Banjarmasin.
3. Realisasi Beban Tunjangan Kehormatan Profesor mengalami kenaikan sebesar 146,77% disebabkan penambahan dua satker, yaitu Poltekkes Jayapura dan Poltekkes Jakarta II yang membayarkan beban Tunjangan Kehormatan Profesor di tahun 2023. Serta adanya kenaikan realisasi beban tersebut pada Poltekkes Semarang, Poltekkes Yogyakarta dan Poltekkes Surabaya.
4. Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan pada Poltekkes BLU mengalami kenaikan sebesar 12,46% disebabkan adanya penambahan satker yang membayarkan Beban Gaji dan Tunjangan BLU yang sebelumnya 17 satker di tahun 2022 menjadi 18

satker di 2023, penambahan tersebut adalah Poltekkes Kalimantan Timur.

Beban Persediaan
Rp68.693.870.919

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp68.693.870.919,00 dan Rp59.021.456.697,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai/barang-barang persediaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perkantoran. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 59
Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI BEBAN		NAIK (TURUN)
		TAHUN 2023	TAHUN 2022	
593111	Beban Persediaan konsumsi	59.375.966.786	46.777.645.144	26,93
593131	Beban Persediaan bahan baku	8.170.599.678	10.254.459.444	(20,32)
593149	Beban Persediaan Lainnya	1.147.304.455	1.989.352.109	(42,33)
Jumlah Beban Persediaan		68.693.870.919	59.021.456.697	16,39

Beban Barang dan Jasa
Rp2.323.501.729.515

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.323.501.729.515,00 dan Rp5.122.483.633.214,00.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan

jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Terdapat Perbedaan nilai Beban Barang yang tersaji pada Laporan Operasional (LO) dengan nilai Belanja Barang yang tersaji di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disebabkan nilai Beban di LO antara lain dipengaruhi oleh nilai:

1. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 dan 2022;
2. Belanja Barang Dibayar di Muka tahun 2023 dan 2022;
3. Belanja Barang Dibayar di Muka; dan
4. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU yang termasuk kategori belanja barang pada LRA namun menjadi beban pegawai di LO.

Rincian Realisasi Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 60
Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI BEBAN		% Naik (Turun)
		TAHUN 2023	TAHUN 2022	
521111	Beban Keperluan Perkantoran	121.773.113.479	108.843.798.690	11,88
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	385.620.000	577.691.730	(33,25)
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.379.855.222	2.575.793.708	31,22
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	52.782.532.843	36.437.305.439	44,86
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	12.883.079.358	15.632.412.430	(17,59)
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID 19	33.243.541	1.751.861.432	(98,10)
521211	Beban Bahan	89.361.646.448	100.146.000.536	(10,77)
521213	Beban Honor Output Kegiatan	103.400.160.473	94.976.290.826	8,87
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.244.490.392.711	794.994.399.584	56,54
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID 19	-	3.376.172.773.701	(100,00)

KODE AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI BEBAN		% Naik (Turun)
		TAHUN 2023	TAHUN 2022	
521252	Beban Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	3.249.985.612	266.517.371	1.119,43
522111	Beban Langganan Listrik	58.426.634.336	48.928.186.558	19,41
522112	Beban Langganan Telepon	1.135.300.991	3.335.484.375	(65,96)
522113	Beban Langganan Air	5.265.960.571	3.572.560.668	47,40
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	17.375.197.792	27.009.705.093	(35,67)
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	111.039.500	37.700.420	194,53
522131	Beban Jasa Konsultan	3.016.013.574	3.877.246.542	(22,21)
522141	Beban Sewa	19.804.269.152	18.636.201.327	6,27
522151	Beban Jasa Profesi	51.693.164.291	60.932.664.015	(15,16)
522161	Beban Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/ Lembaga	156.700.000	2.100.000	7.361,90
522191	Beban Jasa Lainnya	221.450.211.864	187.844.492.978	17,89
522192	Beban Jasa-Penanganan Pandemi COVID 19	-	315.110.300	(100,00)
525112	Beban Barang - BLU	108.374.970.380	72.433.235.607	49,62
525113	Beban jasa - BLU	63.975.839.176	53.081.536.003	20,52
525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	132.218.921.921	106.193.611.405	24,51
525143	Beban Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	1.556.966.000	403.817.000	285,56
525144	Beban Jasa BLU kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain	218.764.500	10.000.000	-
525152	Beban Barang BLU-Penanganan Pandemi COVID 19	-	30.795.000	(100,00)
525154	Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	-	35.060.000	(100,00)
525162	Beban Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel BLU	5.370.690.490	2.073.748.947	158,98
525163	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel BLU	99.401.000	-	100,00
595112	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	1.408.721.240	235.458.084	498,29
595122	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin BLU	103.333.050	1.115.573.445	(90,74)
595123	Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan BLU	-	4.500.000	(100,00)
Jumlah		2.323.501.729.515	5.122.483.633.214	(54,64)

Realisasi Beban Barang dan Jasa tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022

sebesar 54,64% disebabkan penurunan realisasi Belanja Barang dan Jasa dalam rangka penanganan Pandemi COVID 19, terutama realisasi belanja insentif tenaga Kesehatan yang menangani COVID 19, seiring dengan penetapan Berakhirnya Status Pandemi COVID-19 di Indonesia.

*Beban Pemeliharaan
Rp211.688.181.777*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp211.688.181.777,00 dan Rp210.040.798.119,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk adalah sebagai berikut:

Tabel 61
Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI BEBAN		NAIK (TURUN) %
		TAHUN 2023	TAHUN 2022	
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	110.913.054.565	120.059.008.337	(7,62)
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	881.334.145	0	100,00
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	58.009.364.645	56.220.858.608	3,18
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.550.444.989	965.518.303	60,58
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	3.428.577.636	2.957.590.386	15,92
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	1.398.658.325	2.289.045.574	(38,90)
525114	Beban Pemeliharaan BLU	27.465.010.509	18.283.789.807	50,22
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3.755.721.038	3.264.480.737	15,05
593114	Beban Persediaan suku cadang	4.153.162.925	5.937.794.887	(30,06)
595113	Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	132.853.000	62.711.480	111,85
Jumlah		211.688.181.777	210.040.798.119	0,78

Realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2023 meningkat 0,78% dibandingkan tahun 2022. Terdapat kenaikan pada realisasi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar 60,58% dan Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan sebesar 111,85%.

*Beban Perjalanan Dinas
Rp561.336.328.881*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp561.336.328.881,00 dan Rp509.485.931.051,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 62
Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI BEBAN		NAIK (TURUN) %
		TAHUN 2023	TAHUN 2022	
524111	Beban Perjalanan Biasa	222.931.727.618	228.377.975.404	(2,38)
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.316.555.774	17.874.072.332	13,66
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	62.001.665.300	76.479.153.278	(18,93)
524115	Belanja Perjalanan Dinas- Penanganan Pandemi COVID 19	-	3.638.726.399	(100,00)
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	146.310.272.544	109.017.106.285	34,21
524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	12.134.537.126	1.932.262.647	528,00
525115	Beban Perjalanan	97.641.570.519	72.166.634.706	35,30
	Jumlah	561.336.328.881	509.485.931.051	10,18

Realisasi Beban Perjalanan tahun 2023 meningkat sebesar 10,18% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan Beban Perjalanan Biasa- Luar Negeri sebesar 528% dibandingkan tahun 2022, disebabkan adanya pelaksanaan Studi banding terkait College Based pada Poltekkes. Belanja Perjalanan Luar Negeri tahun 2023 terdapat tujuh satuan kerja sedangkan pada tahun 2022 hanya terdapat pada tiga satker.

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp5.945.769.101*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.945.769.101,00 dan Rp7.208.807.899,00. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 63
Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI BEBAN		NAIK (TURUN) %
		TAHUN 2023	TAHUN 2022	
593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.190.216.000	-	100,00
593126	Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	4.755.553.101	7.160.522.899	(33,59)
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	48.285.000	(100,00)
Jumlah		5.945.769.101	7.208.807.899	(17,52)

Beban Bantuan Sosial
Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp454.664.845.375

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp454.664.845.375,00 dan Rp411.130.639.003,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 64
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	REALISASI BEBAN		% Naik (TURUN)
		TAHUN 2023	TAHUN 2022	
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	291.485.314.317	258.191.494.776	12,90
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	150.051.038.859	140.519.919.825	6,78
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	3.291.061.169	4.034.064.572	(18,42)
591312	Beban Penyusutan Irigasi	893.679.547	894.295.632	(0,07)
591313	Beban Penyusutan Jaringan	1.986.383.166	2.271.957.516	(12,57)
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	34.353.493	67.979.182	(49,46)
592112	Beban Amortisasi Hak Cipta	264.000	264.000	-
592114	Beban Amortisasi Paten	650.000	535.000	21,50
592115	Beban Amortisasi Software	4.693.308.965	3.512.645.780	33,61
592116	Beban Amortisasi Lisensi	4.950.000	16.545.000	(70,08)
592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	107.963.063	-	#DIV/0!
592222	Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	2.115.878.796	1.620.937.720	30,53
Jumlah		454.664.845.375	411.130.639.003	10,59

Penjelasan terkait Beban Penyusutan adalah sebagai berikut :

1. Beban Amortisasi Hak Cipta terdapat pada Poltekkes Medan sebesar Rp264.000,00.
2. Beban Amortisasi Paten sebesar Rp660.000,00 terdapat pada Poltekkes Jakarta I dan Poltekkes Jakarta II masing-masing sebesar Rp40.000,00 dan Rp610.000,00.
3. Beban Amortisasi Lisensi sebesar Rp4.950.000,00 terdapat pada Poltekkes Banten.

Beban Penyisihan
Piutang Tak tertagih
Rp36.951.472,00

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp36.951.472,00 dan minus Rp461.313.135,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 65
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI BEBAN		% Naik (TURUN)
		TAHUN 2023	TAHUN 2022	
594211	Beban Penyisihan Piutang PNPB	-	9.720.750	(100,00)
594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	30.664.020	(100,00)
594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	60.000	-	100,00
594612	Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	36.725.950	174.065.175	(78,90)
594713	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU	69.767	-	100,00
594791	Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	95.755	26.430	262,30
594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	-	246.836.760	(100,00)
Jumlah		36.951.472	461.313.135	(91,99)

Defisit dari Kegiatan
Non Operasional
Rp26.241.957.877

D.11 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dan Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp26.241.957.877,00 dan

Rp14.327.786.593,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 66
Perbandingan Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(46.927.081.312)	(13.186.769.169)	255,86
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	6.623.060.754	3.221.107.725	105,61
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	53.550.142.066	16.407.876.894	226,37
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	20.685.123.435	27.514.555.762	(24,82)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	21.269.891.327	27.567.985.162	(22,85)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	584.767.892	53.429.400	994,47
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(26.241.957.877)	14.327.786.593	(283,15)

Adapun rincian Pendapatan dan Beban Non Operasional TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 67
Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	NAIK (TURUN) %
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	960.606.531	152.913.896	528,20
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	3.766.004.953	2.090.400.330	80,16
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.896.449.270	977.793.499	93,95
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	799.488.985	440.406.795	81,53
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	19.694.449.970	23.777.701.632	(17,17)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	720.021.900	3.000.000.000	(76,00)
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-	102.741.800	(100,00)
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL	53.681.472	162.648.976	(67,00)
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU TAYL	-	80.904.659	(100,00)
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	2.249.000	-	100,00
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	-	3.581.300	(100,00)
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan *)	-	(34.743.000)	(100,00)
596111	Kerugian Pelepasan Aset	(53.550.142.066)	(16.407.876.894)	226,37
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	(584.767.892)	(18.686.400)	3.029,38
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(26.241.957.877)	14.327.786.593	(283,15)

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2023*

Pendapatan Perolehan Aset Lainnya sebesar Rp2.249.000,00 terdapat pada Poltekkes Mataram, merupakan perolehan 1 unit TV dari Hotel Aruna.

Nilai Signifikan pada tahun 2023 terdapat pada Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL dan Beban Pelepasan Aset.

Beban Kerugian Pelepasan Aset Tahun 2023 adalah sebesar Rp53.550.142.066,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 68
Rincian Beban Pelepasan Aset

(dalam Rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	656.581.013
2	BBPK Jakarta	4.312.002
3	Bapelkes Semarang	129.854.632
4	BBPK Makassar	3.958.260
5	Bapelkes Batam	62.097.342
6	Bapelkes Mataram	957.381.182
7	Poltekkes Jakarta I	6.502.074.400
8	Poltekkes Jakarta II	1.417.267.811
9	Poltekkes Jakarta III	1.277.390.783
10	Poltekkes Surakarta	4.763.500
11	Poltekkes Surabaya	3.839.876.189
12	Poltekkes Aceh	46.456.368
13	Poltekkes Medan	320.000
14	Poltekkes Padang	268.458.400
15	Poltekkes Bengkulu	550.676.128
16	Poltekkes Tanjungkarang	751.782.034
17	Poltekkes Pontianak	5.542.458.092
18	Poltekkes Palangkaraya	60.861.608
19	Poltekkes Kalimantan Timur	29.869.114.000
20	Poltekkes Makassar	1.968.625
21	Poltekkes Ternate	298.804.508
22	Poltekkes Denpasar	36.349.120
23	Poltekkes Mataram	126.219.000
24	Poltekkes Kupang	1.141.117.069
Total		53.550.142.066

Beban Pelepasan Aset pada Poltekkes Kalimantan Timur merupakan hibah keluar tanah dari Poltekkes ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

*Pos-Pos Luar Biasa
Rp0,00*

D.12 POS-POS LUAR BIASA

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas.

DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Defisit LO merupakan penjumlahan dari defisit kegiatan operasional, dan surplus kegiatan non operasional. Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp3.657.775.559.945,00 dan Rp6.507.827.628.525,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 69
Rincian Surplus/Defisit Laporan Operasional TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	% Kenaikan (Penurunan)
Defisit dari Kegiatan Operasional	(3.634.371.075.642)	(6.522.155.415.118)	(44,28)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	(26.241.957.877)	14.327.786.593	(283,15)
(Defisit) Laporan Operasional	(3.660.613.033.519)	(6.507.827.628.525)	(43,75)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp17.368.156.846.181*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp17.368.156.846.181,00 dan Rp16.507.001.798.453,00.

*Defisit LO
Rp3.660.613.033.519*

E.2 Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah defisit sebesar Rp3.660.613.033.519,00 dan Rp6.507.827.628.525,00. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp0*

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp0*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Koreksi Nilai Persediaan
Rp1.306.800*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi ini merupakan koreksi saldo awal atas saldo Persediaan. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

adalah sebesar Rp1.306.800,00 dan Rp69.178.695,00. Koreksi Saldo Awal persediaan dilakukan untuk mencatat Persediaan perolehan tahun sebelumnya yang belum tercatat di Neraca. Koreksi Nilai Persediaan tahun 2023 terdapat pada Poltekkes Banjarmasin merupakan koreksi atas persediaan tahun 2022 yang sebelumnya sudah dicatat keluar tahun 2022 tetapi masih ada di gudang pada tanggal neraca 31 Desember 2023.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi
(Rp21.445.871.095)*

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset adalah selisih nilai buku pada transaksi reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk aset, baik Persediaan maupun Aset Tetap di tahun berjalan. Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp21.445.871.095,00) dan (Rp126.417.400,00).

Tabel 70
Rincian Koreksi Atas Reklasifikasi TA 2023 Per Satker

(dalam Rupiah)

Nama Satker	Nilai Koreksi
Kantor Pusat Ditjen Tenaga Kesehatan	(15.493.917.528)
Poltekkes Jakarta III	(5.816.423.567)
Poltekkes Bandung	(135.530.000)
Total	(21.445.871.095)

1. Koreksi atas reklasifikasi pada Poltekkes Jakarta III merupakan transaksi reklasifikasi keluar Gedung dan Bangunan yang dilakukan karena kesalahan kode aset dan nama.
2. Koreksi atas reklasifikasi pada Poltekkes Bandung merupakan transaksi reklasifikasi keluar Peralatan dan Mesin yang dilakukan karena kesalahan kode aset dan nama.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi (Rp66.328.619.948)

E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp66.328.619.948,00) dan Rp21.317.995.743,00. Koreksi ini berasal dari koreksi nilai aset tetap yang berasal dari penginputan saldo awal, reklas masuk/reklas keluar dan koreksi pencatatan nilai/kuantitas. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi berdasarkan Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 71
Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi TA 2023 Per Satker

(dalam Rupiah)

Nama Satker	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	
Bapelkes Cikarang	(163.656.900)
BBPK Ciloto	(287.015.414)
Kantor Pusat Ditjen Tenaga Kesehatan	(31.776.408.110)
Poltekkes Jakarta I	5.574.700
Poltekkes Jakarta II	(92.410.968)
Poltekkes Jakarta III	(10.979.813.216)
Poltekkes Bandung	(2.638.587.621)
Poltekkes Semarang	(173.224.911)
Poltekkes Yogyakarta	1.392.832

Nama Satker	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	
Poltekkes Malang	(38.568.533)
Poltekkes Surabaya	(39.792.525)
Poltekkes Medan	(109.491.540)
Poltekkes Riau	(1.380.967.200)
Poltekkes Palembang	(89.290.950)
Poltekkes Bengkulu	(23.165.211)
Poltekkes Pontianak	72.065
Poltekkes Palangkaraya	(608.178.380)
Poltekkes Banjarmasin	(28.097.227.415)
Poltekkes Kalimantan Timur	7.682.822.251
Poltekkes Makassar	151.812
Poltekkes Maluku	2.070.935.000
Poltekkes Ternate	16.212.500
Poltekkes Jayapura	(190.997.300)
Poltekkes Denpasar	479.569
Poltekkes Kupang	(841.410.000)
Poltekkes Banten	(983.082.117)
Poltekkes Tanjung Pinang	1.414.502
Poltekkes Sorong	2.770.694.495
Total Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(65.963.538.585)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	
Kantor Pusat Ditjen Tenaga Kesehatan	(176.866.230)
Poltekkes Surakarta	(178.809.900)
Poltekkes Banten	(9.405.233)
Total Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(365.081.363)
Total Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(66.328.619.948)

Adapun Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi berdasarkan Jenis Transaksi adalah sebagai berikut:

Lain-lain
Rp9.048.839.527

E.4.6 Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.048.839.527,00 dan Rp32.960.868.171,00. Rincian Koreksi Lain-Lain adalah sebagai berikut :

Tabel 72
Rincian Transaksi Lain- Lain TA 2023

(dalam Rupiah)

Jenis Koreksi	Jumlah Koreksi
Koreksi nilai Piutang	22.000
Koreksi nilai Penyisihan Piutang	(110)
Koreksi Beban Penyisihan Piutang	26.609.075
Koreksi nilai Kewajiban Diestimasi	9.474.997.242
Koreksi nilai Belanja Yang Masih Harus Dibayar	27
Koreksi nilai Tunggalan Set. KTKI setelah direviu Itjen	22.311.000
Koreksi Beban Pegawai	(636.254.043)
Koreksi nilai Pendapatan Diterima di Muka	(56.570.252)
Penyesuaian SAL BLU	217.724.588
Total	9.048.839.527

Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

1. Koreksi Nilai Piutang sebesar Rp22.000,00 merupakan koreksi atas kurang catat nilai Piutang pada Poltekkes Mamuju;
2. Koreksi nilai Penyisihan Piutang sebesar Rp110,00 pada Poltekkes Mamuju;
3. Koreksi nilai Beban Penyisihan Piutang pada Poltekkes Padang, Jakarta II, Makassar, Malang, Gorontalo dan Kendari dengan total sebesar Rp26.609.075,00 merupakan penyesuaian atas nilai beban penyisihan piutang di sisi kredit sesuai surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-

27/PB/PB.6/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 (*Unaudited*) serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun;

4. Koreksi nilai Kewajiban Diestimasi pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebesar Rp9.474.997.242,00 disebabkan koreksi perbedaan nilai insentif tenaga Kesehatan yang diakui di Neraca dengan nilai yang disetujui oleh BPKP untuk dibayarkan;
5. Koreksi nilai Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebesar Rp27,00 disebabkan koreksi atas perbedaan nilai insentif yang telah disetujui oleh BPKP dan diakui di Neraca satker dengan nilai yang dibayarkan oleh satker ke Tenaga Kesehatan;
6. Koreksi nilai Utang sebesar Rp22.311.000, 00 pada kantor Pusat Direktorat Jenderal tenaga Kesehatan merupakan selisih nilai tunggakan Sekretariat KTKI yang diusulkan dan diakui Utang dengan nilai setelah direviu oleh Inspektorat Jenderal;
7. Koreksi Beban Pegawai sebesar Rp19.953.335,00 pada Poltekkes Banjarmasin merupakan koreksi nilai Beban Pegawai tahun 2022 yang dibayar tahun 2023 namun pada tahun sebelumnya belum tercatat sebagai Utang.
8. Koreksi Beban Gaji BLU sebesar Rp616.300.708,00 pada Poltekkes Tanjungkarang merupakan koreksi atas pembayaran kekurangan remunerasi pegawai BLU periode Juni sampai dengan Desember 2022 yang

dibayarkan tanggal 14 Maret 2023 namun pada tahun sebelumnya belum tercatat sebagai Utang.

9. Koreksi pencatatan Pendapatan Diterima di Muka yang belum pernah dicatat pada tahun sebelumnya sebesar Rp56.570.252,00 pada Poltekkes Jakarta III dan Bengkulu.
10. Penyesuaian SAL BLU pada Poltekkes Palu merupakan pencatatan saldo awal Kas BLU atas penarikan saldo PNBPN tahun 2022.

Rincian transaksi Lain-lain TA 2023 Berdasarkan Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 73
Rincian Lain- Lain TA 2023 Berdasarkan Satuan Kerja
(dalam Rupiah)

Nama Satker	Nilai
Koreksi Lainnya	
Kantor Pusat Ditjen Tenaga Kesehatan	9.497.308.269
Poltekkes Jakarta II	1.677.750
Poltekkes Jakarta III	(40.570.252)
Poltekkes Bandung	1.388.500
Poltekkes Semarang	3.037.150
Poltekkes Yogyakarta	26.430
Poltekkes Malang	4.529
Poltekkes Padang	444.600
Poltekkes Jambi	168.750
Poltekkes Tanjungkarang	(616.300.708)
Poltekkes Bengkulu	(16.000.000)
Poltekkes Banjarmasin	(19.953.335)
Poltekkes Makassar	18.500.000
Poltekkes Kendari	60.000
Poltekkes Gorontalo	310.000
Poltekkes Mamuju	1.013.256
Total Koreksi Lainnya	8.831.114.939
Penyesuaian SAL BLU	
Poltekkes Palu	217.724.588
Total Penyesuaian SAL BLU	217.724.588
Total Lain-Lain	9.048.839.527

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp4.672.648.851.440

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.672.648.851.440,00 dan Rp7.314.508.216.244,00. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Tabel 74
Rincian Transaksi Antar Entitas TA 2023
(dalam Rupiah)

Akun	Transaksi antar Entitas	Nilai
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	4.938.482.093.205
313121	Diterima dari Entitas Lain	(303.463.549.374)
313211	Transfer Keluar	(3.189.405.949)
313221	Transfer Masuk	32.987.213.777
391131	Pengesahan Hibah Langsung	5.824.214.372
391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(309.154.591)
391133	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	2.317.440.000
	Jumlah	4.672.648.851.440

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp303.463.549.374,00 sedangkan DKEL sebesar Rp4.938.482.093.205,00.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada

internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp32.987.213.777,00 dan Rp3.189.405.949,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 75
Rincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar TA 2023
(dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Nilai Transfer Masuk	Nilai Transfer Keluar
117111	Barang Konsumsi	234.814.402	13.200.000
132111	Peralatan dan Mesin	34.860.497.084	
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.108.097.709)	
166112	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	683.394.000	5.982.798.187
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(683.394.000)	(2.806.592.238)
Jumlah		Rp 32.987.213.777	Rp 3.189.405.949

Perbedaan nilai Transfer Masuk dan Transfer Keluar pada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebesar Rp29.797.807.828,00 antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Transaksi Likuidasi masuk dari Satker Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, Gorontalo, dan Papua Barat yang sebelumnya merupakan satker Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan ke satker Sekretariat Jenderal Jenderal Tenaga Kesehatan sebesar Rp3.189.45.949,00.
- 2) Transaksi Transfer Masuk Peralatan dan Mesin dari Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan

Kesehatan ke satker Poltekkes Jakarta II sebesar Rp539.593.750,00 dengan nilai akumulasi Penyusutan sebesar Rp539.593.750,00, sehingga nilai buku Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp0,00.

- 3) Transaksi Transfer Masuk Peralatan dan Mesin dari Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan ke satker Poltekkes Bandung sebesar Rp19.725.000,00 dengan nilai akumulasi Penyusutan sebesar Rp17.325.625,00, sehingga nilai buku Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp2.399.375,00.
- 4) Transaksi Transfer Masuk Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten (satker Sekretariat Jenderal) ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebesar Rp683.394.000,00.
- 5) Transaksi Transfer Masuk Peralatan dan Mesin dari Sekretariat Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ke satker Poltekkes Jakarta I, Jakarta II, Poltekkes Jakarta III, Poltekkes Medan, Poltekkes Bandung, Poltekkes Tasikmalaya, Poltekkes Semarang, Poltekkes Surakarta, Poltekkes Kupang, Poltekkes Makassar, Poltekkes Malang, Poltekkes Surabaya, dan Poltekkes Banten sebesar Rp32.750.000.000,00.
- 6) Transaksi Transfer Masuk Persediaan dari Sekretariat Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ke satker Poltekkes Tanjungkarang, Jakarta II, Manado, Surabaya, dan Mamuju sebesar Rp234.814.402,00.
- 7) Transaksi Transfer Masuk Peralatan dan Mesin dari Kantor Pusat Sekretariat Jenderal ke Poltekkes Jakarta III sebesar Rp140.800.000,00.

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp5.824.214.372,00. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp309.154.591,00.

Tabel 76
Rincian Pengesahan Hibah Langsung TA 2023

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Uang	Rp 3.436.594.978
2	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Jasa	Rp 615.749.394
3	Poltekkes Jakarta I	Barang	Rp 24.220.000
4	Poltekkes Jayapura	Uang	Rp 1.747.650.000
Total Pengesahan			Rp 5.824.214.372
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp 309.154.591
Jumlah			Rp 5.515.059.781

Rincian Hibah pada Ditjen Tenaga Kesehatan antara lain :

1. Hibah Uang pada Kantor Pusat Ditjen Tenaga Kesehatan terdiri dari hibah uang WHO sebesar Rp2.318.814.103,00 dan hibah uang UNFPA sebesar Rp1.117.780.875,00.
2. Hibah Jasa pada Kantor Pusat Ditjen Tenaga Kesehatan berasal dari UNFPA sebesar Rp615.749.394,00.
3. Hibah Barang pada Poltekkes Jakarta I merupakan hibah empat unit Oxygen Concentrator Merek Sowell

dari PT Kawan Lama Solution.

4. Hibah uang pada Poltekkes Jayapura sebesar Rp1.747.650.000,00 berasal dari Pemda Yahukimo.

E.5.4 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Pengesahan Hibah Langsung TAYL sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.317.440.000,00 merupakan hibah Tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Kepada Poltekkes Palu.

Kenaikan/ Penurunan Ekuitas

Nilai Kenaikan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp976.203.215.395,00 dan Rp861.155.047.728,00.

Kenaikan ekuitas Tahun 2023 diperoleh dari rincian :

- Defisit LO sebesar Rp3.660.613.033.519,00
- Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Rp0
- Koreksi yang mengurangi ekuitas Rp35.832.602.526,00
- Transaksi Antar Entitas Rp4.672.648.851.440,00.

Ekuitas Akhir

Rp18.344.360.061.576

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp18.344.360.061.576,00 dan Rp17.368.156.846.181,00. Nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2023 diperoleh dengan rincian :

- Ekuitas awal 1 Januari 2023 Rp17.368.156.846.181,00; dan
- Kenaikan ekuitas Tahun 2023 Rp976.203.215.395,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Pinjaman Luar Negeri I-SPHERE

Terdapat pinjaman luar negeri Indonesia-Supporting Primary and Refereal Health Care Reform (I-SPHERE) yang akan digunakan untuk kegiatan sektor kesehatan termasuk diantaranya untuk pembangunan tiga rumah sakit vertikal di wilayah timur Indonesia yang telah tercantum pada Green Book 2018. Kegiatan tersebut akan didanai dari pinjaman Bank Dunia dengan Perjanjian Pinjaman IBRD 8873: I-SPHERE Program total pinjaman sebesar USD 150 juta telah ditandatangani oleh Menkeu dan Country Director Bank Dunia Jakarta pada tanggal 17 Juli 2018. Pencairan dana pinjaman berdasarkan pada capaian indikator program kesehatan yang sudah disepakati antara pemerintah RI dan Bank Dunia (mekanisme Program for Results/P4R).

Program For Results maksudnya adalah suatu mekanisme pembiayaan dimana pencairan pinjaman dihubungkan langsung dengan tercapainya indikator output kinerja yang telah disepakati dan telah diverifikasi oleh institusi independen yang kemudian kita sebut sebagai Disbursement linked Indicator (DLI) dan tidak terkait langsung dengan pengeluaran input yang telah dilakukan untuk mencapai output tersebut.

Program/proyek I-SPHERE ini memiliki tujuan penguatan sistem pelayanan Kesehatan primer dan rujukan di Indonesia yang ke depannya diperoleh *outcome* yang meningkatkan kualitas belanja Kesehatan, dengan pendekatan empat tujuan yang akan dicapai di antaranya:

- a. Penguatan pemantauan terhadap kinerja untuk kapasitas pemerintah daerah dan peningkatan akuntabilitas;
- b. Peningkatan penerapan standar nasional untuk kinerja pemerintah daerah dan kinerja fasilitas;

- c. Peningkatan orientasi kinerja pembiayaan Kesehatan untuk pemberian pelayanan local yang lebih baik; dan
- d. Pemenuhan sarana, prasarana dan SDM Kesehatan UPT Vertikal di tiga Provinsi Kawasan Timur Indonesia.

Adapun Indikator kinerja program I-SPHERE yang sudah disepakati adalah 10 Indikator DLI (Disbursement Linked Indicators) yang harus tercapai pada Tahun 2023. Program yang tercakup tidak hanya terkait dengan Pelayanan Kesehatan Primer namun terkait dengan rujukan terintegrasi ke FKTRL serta aspek pembiayaannya dari segi DAK Non Fisik dan Kapitasi Puskesmas.

Disbursement Linked Indicators (DLI) adalah sebagai berikut :

- a. Kabupaten/Kota yang tercakup di dashboard data dan informasi kesehatan (DLI 1);
- b. Puskesmas yang menggunakan Aplikasi m-Health yang menunjang Pelaksanaan PIS-PK yang disempurnakan (DLI 2);
- c. Puskesmas mendapatkan tingkat akreditasi yang lebih tinggi di luar Kawasan Timur Indonesia (DLI 3);
- d. Puskesmas yang terakreditasi di semua tingkat di Kawasan Timur Indonesia (DLI 4);
- e. Komisi Akreditasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (KAFKTP) berfungsi sebagai komisi independen (DLI 5);
- f. Kabupaten/Kota bermasalah yang menghasilkan rencana tahunan (DLI 6);
- g. Penugasan khusus tenaga kesehatan (DLI 7);
- h. Fasilitas pelayanan primer dapat mengimplementasikan Kapitasi JKN berdasarkan indikator kinerja (DLI 8);
- i. Kabupaten/Kota yang menunjukkan peningkatan minimal setengah dari indikator kinerja dalam penetapan DAK-Non Fisik (DLI 9);
- j. Jumlah provinsi yang menerapkan sistem rujukan terpadu terintegrasi (DLI 10)

Realisasi penggunaan Pinjaman Luar Negeri I-SPHERE sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp261.843.482.639,00 atau 96,48% dari alokasi anggaran sebesar Rp271.405.331.000,00 dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 77
Rincian Alokasi dan Realisasi Rupiah Murni Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan atas Kegiatan *Boundaries* Program/Project I-SPHERE Tahun 2023

(dalam Rupiah)

Unit/ Eselon I	Program	Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
024.12 DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	DG. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	6812 Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	43.109.874.000	39.057.290.009	90,60%
	DL. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	6822 Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	228.295.457.000	222.786.192.630	97,59%
Total			271.405.331.000	261.843.482.639	96,48%

2. Program Percepatan Penurunan Stunting

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen kuat dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia. Stunting merupakan permasalahan yang multi-dimensional sehingga perlu koordinasi dan komitmen lintas sektor tidak hanya sektor kesehatan tetapi juga sektor non-kesehatan. Upaya dan kontribusi lintas sektor, antara lain penyediaan air minum dan sanitasi, pendidikan untuk perbaikan pola asuh, gizi seimbang, pemberian makanan bayi serta perlindungan sosial terutama pada kelompok rentan perlu diperkuat. Penguatan pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor ini perlu dipastikan konvergensinya dari tingkat pusat sampai tingkat desa agar tepat sasaran menjangkau 1.000 hari pertama kehidupan yaitu rumah tangga dengan ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan, ibu menyusui dan

anak usia 24-59 bulan, serta remaja putri dan calon pengantin.

Upaya penguatan konvergensi di tingkat pusat sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran yang dilakukan dengan pendekatan money follow program dan THIS (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial). Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan secara periodik sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektor yang mengacu pada Strategi Nasional Percepatan Anak Kerdil (Stunting) dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Realisasi Anggaran Pada Tingkat Rincian Output

Realisasi anggaran pada tingkat output dilakukan untuk melihat alokasi pagu awal dan pagu revisi terhadap realisasi anggarannya pada level RO. Pagu awal dan Pagu Revisi pada level RO merupakan total anggaran dari seluruh komponen dan subkomponen yang ada di dalam RO tersebut, dan akan terlihat over-estimate jika dibandingkan analisis pada level analisis lanjutan yang total anggarannya telah dilakukan analisis pada komponen/sub-komponen yang hanya terkait dengan penurunan stunting. Analisis pada level output ini bertujuan untuk melihat perbaikan yang dilakukan oleh K/L dalam upaya mempertajam RO tersebut yang terkait dengan penurunan stunting. Pada level RO, realisasi anggaran mencapai Rp35.238.945.281,00 yaitu 97,04% dari alokasi sebesar Rp36.313.564.000,00.

Tabel 78
Alokasi Realisasi Program Percepatan Penurunan *Stunting* per Jenis
Intervensi di Tingkat Rincian Output Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Jenis Intervensi	Kinerja Anggaran di Tingkat Rincian Output		
		Alokasi	Realisasi	% Realisasi
1	Intervensi Gizi Spesifik	7.836.229.000	7.604.070.781	97,04%
2	Intervensi Dukungan	28.477.335.000	27.634.874.500	97,04%
Total		36.313.564.000	35.238.945.281	97,04%

Rincian alokasi realisasi dan capaian output program percepatan penurunan *stunting* level RO Tahun 2023 pada Lampiran CaLK ini.

Realisasi Anggaran dan Capaian Output pada Level Analisis Lanjutan

Untuk memastikan tingkat akurasi analisis yang mendalam terkait realisasi anggaran, maka dilakukan analisis lanjutan atas keseluruhan RO, yaitu melalui pemetaan komponen/sub-komponen yang terkait dengan intervensi penurunan *stunting* dan dengan menggunakan asumsi bobot kontribusi kegiatan/anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk penurunan *stunting*. Pada level analisis lanjutan, realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2023 dalam upaya penurunan *stunting* mencapai Rp14.368.087.384,00 atau 92,23% dari alokasi sebesar Rp13.251.902.165,00.

Tabel 79
Alokasi Realisasi Program Percepatan Penurunan *Stunting* per Jenis
Intervensi Level Analisis Lanjutan Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Jenis Intervensi	Kinerja Anggaran pada Level Analisis Lanjutan		
		Alokasi	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1	Intervensi Gizi Spesifik	7.836.229.000	7.604.070.781	97,04%
2	Intervensi Dukungan	6.531.858.384	5.647.831.384	86,47%
Total		14.368.087.384	13.251.902.165	92,23%

Rincian alokasi realisasi dan capaian output program percepatan penurunan *stunting* level analisis lanjutan Tahun 2023 disajikan pada Lampiran CaLK ini.

3. Likuidasi Satker DK/TP

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga dan Surat Sekretaris Jenderal Nomor PR.04.02/5/3545/2022 hal Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Kesehatan Tahun 2023 maka satuan kerja Dekonsentrasi yang sudah tidak mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2023 harus dilakukan Likuidasi sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan. Pengalokasian anggaran untuk Satuan Kerja Dekonsentrasi selanjutnya diintegrasikan di Sekretariat Jenderal dan dialokasikan dalam satu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Dinas Provinsi sehingga perlu menetapkan pemimpin entitas akuntansi yang dilikuidasi yang merupakan penanggung jawab proses likuidasi entitas akuntansi.

Pada tahun 2023 terdapat 8 (delapan) satker dari total 34 satker Dekonsentrasi di bawah Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang dilikuidasi ke unit utama Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yang masih memiliki aset, baik Aset Lancar maupun Aset Lainnya. Adapun rincian nilai Aset Satker Dekonsentrasi yang dilikuidasi adalah sebagai berikut :

Tabel 80

Rincian Nilai Aset Satker Dekonsentrasi yang Dilikuidasi Tahun 2023
(dalam Rupiah)

No	Nama Satker	Persediaan	Aset Lain-Lain		Jumlah Aset
			Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	
1	Dinkes Prov Jawa Tengah		6.830.000	(6.830.000)	-
2	Dinkes Prov Sumatera Barat		4.240.576.443	(1.319.014.878)	2.921.561.565
3	Dinkes Prov Jambi		353.030.180	(190.644.660)	162.385.520
4	Dinkes Prov Kalimantan Tengah	13.200.000			13.200.000
5	Dinkes Prov Sulawesi Selatan		197.000.000	(197.000.000)	-
6	Dinkes Banten		683.394.000	(683.394.000)	-
7	Dinkes Prov Gorontalo		314.082.564	(287.263.700)	26.818.864
8	Dinkes Prov Papua Barat		187.885.000	(122.445.000)	65.440.000
Jumlah		13.200.000	5.982.798.187	(2.806.592.238)	3.189.405.949

4. Transformasi Poltekkes menjadi Satuan Kerja dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Selama Tahun 2023

Sampai dengan tahun 2022, terdapat 18 satker Poltekkes yang sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU, antara lain :

1. Poltekkes Jakarta II
2. Poltekkes Jakarta III
3. Poltekkes Bandung
4. Poltekkes Tasikmalaya
5. Poltekkes Semarang
6. Poltekkes Surakarta
7. Poltekkes Yogyakarta
8. Poltekkes Surabaya
9. Poltekkes Malang
10. Poltekkes Medan
11. Poltekkes Tanjungkarang
12. Poltekkes Bengkulu

13. Poltekkes Pontianak
14. Poltekkes Kaltim
15. Poltekkes Manado
16. Poltekkes Makassar
17. Poltekkes Denpasar
18. Poltekkes Kupang

Pada tahun 2023 terdapat 14 Poltekkes yang bertransformasi menjadi satker dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLU. Namun baru 10 satker yang terbit DIPA BLU di tahun 2023. Rincian penetapan satker Poltekkes BLU disajikan pada tabel berikut :

Tabel 81
Rincian Penetapan Satker Poltekkes BLU Tahun 2023

No	Nama Satker	Keputusan Menteri Keuangan		DIPA BLU		
		Nomor	Tanggal	Nomor	Revisi	Tanggal
1	Poltekkes Jambi	Nomor 59/KMK.05/2023	22 Februari 2023	SP DIPA- 024.12.2.632149/2023	7	11 September 2023
2	Poltekkes Palembang	Nomor 59/KMK.05/2023	22 Februari 2023	SP DIPA- 024.12.2.632160/2023	5	13 Juli 2023
3	Poltekkes Palangkaraya	Nomor 59/KMK.05/2023	22 Februari 2023	SP DIPA- 024.12.2.637571/2023	4	10 Mei 2023
4	Poltekkes Banjarmasin	Nomor 59/KMK.05/2023	22 Februari 2023	SP DIPA- 024.12.2.632310/2023	5	6 Juni 2023
5	Poltekkes Aceh	Nomor 234 Tahun 2023	6 Juli 2023	SP DIPA- 024.12.2.637592/2023	8	18 Agustus 2023
6	Poltekkes Banten	Nomor 234 Tahun 2023	6 Juli 2023	SP DIPA- 024.12.2.637615/2023	11	23 Oktober 2023
7	Poltekkes Pahu	Nomor 346 Tahun 2023	20 September 2023	SP DIPA- 024.12.2.632331/2023	11	9 November 2023
8	Poltekkes Maluku	Nomor 346 Tahun 2023	20 September 2023	SP DIPA- 024.12.2.637600/2023	8	25 Oktober 2023
9	Poltekkes Mataram	Nomor 346 Tahun 2023	20 September 2023	SP DIPA- 024.12.2.632270/2023	10	9 November 2023
10	Poltekkes Padang	Nomor 346 Tahun 2023	20 September 2023	SP DIPA- 024.12.2.632128/2023	11	9 November 2023
11	Poltekkes Riau	Nomor 456 Tahun 2023	15 Desember 2023			
12	Poltekkes Gorontalo	Nomor 456 Tahun 2023	15 Desember 2023			
13	Poltekkes Kendari	Nomor 456 Tahun 2023	15 Desember 2023			
14	Poltekkes Sorong	Nomor 456 Tahun 2023	15 Desember 2023			

5. Rincian Anggaran dan Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2023

Anggaran dan realisasi Insentif tenaga kesehatan tahun 2023 terdiri dari insentif tenaga kesehatan tahun 2023 dan pembayaran tunggakan insentif tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 82

Rincian Anggaran dan Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan Tahun 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan 2022	94.246.439.000	94.246.437.954	100,00
Insentif Tenaga Kesehatan Januari - Maret 2023	64.211.795.000	63.523.082.259	98,93
Insentif Tenaga Kesehatan April - Juni 2023	118.828.556.000	118.828.556.000	100,00
Jumlah	277.286.790.000	276.598.076.213	99,75

Dengan berakhirnya status pandemi COVID-19 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia tanggal 22 Juni 2023 maka anggaran dan pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Penanggulangan Pandemi COVID-19 pada Sekretariat Ditjen Nakes hanya untuk pembayaran tunggakan tahun 2022 dan insentif tenaga kesehatan bulan Januari sampai dengan Juni 2023.

6. Progress Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan 2022

Nilai tunggakan pembayaran insentif tenaga kesehatan tahun 2022 yang diusulkan pada Laporan Keuangan Audited tahun 2022 adalah sebesar Rp103.721.435.223,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 83
Rincian Nilai Usulan Tunggakan Insentif Tahun 2022 yang disajikan di
Neraca per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah Nakes	Nominal
1	Insentif Program Pendidikan Dokter Spesialis	3.557	23.389.287.211
2	Insentif Tenaga Kesehatan bertugas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	16.501	77.562.505.133
3	Insentif Relawan	457	2.769.642.879
Jumlah		20.515	103.721.435.223

Verifikasi dan reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah dilakukan dalam lima tahap, antara lain:

1. Laporan Reviu atas Tunggakan Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan Tahun 2022 Tahap-I tertuang dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PE.12.03/39/D2/03/2023 tanggal 13 Maret 2023;
2. Laporan Reviu atas Tunggakan Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan Tahun 2022 Tahap II dan III tertuang dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PE.12.03/SP-46/D2/03/2023 tanggal 31 Maret 2023;
3. Laporan Reviu atas Tunggakan Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan Tahun 2022 Tahap IV tertuang dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PE.12.03/SP-52/D2/03/2023 tanggal 13 April 2023; dan
4. Laporan Reviu atas Tunggakan Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan Tahun 2022 Tahap V tertuang dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PE.12.03/LHR-107/D203/3/2023 tanggal 14 Juni 2023.

Rincian nilai yang disetujui pada tahapan verifikasi tunggakan berdasarkan jenis Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 84
Tahap Verifikasi Tunggakan Insentif Tahun 2022 oleh BPKP

No	Uraian	Program Pendidikan Dokter Spesialis		Tenaga Kesehatan bertugas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS/KKP/Balai/Lab)		Relawan		Total	
		Jumlah Nakes	Nilai (Rp)	Jumlah Nakes	Nilai (Rp)	Jumlah Nakes	Nilai (Rp)	Jumlah Nakes	Nilai (Rp)
1	Tahap I	85	678.571.428	1.835	6.766.250.599			1.920	7.444.822.027
2	Tahap II dan III	624	3.266.964.285	10.143	46.277.503.424			10.767	49.544.467.709
3	Tahap IV	1.811	10.220.183.076	3.744	19.722.143.792	457	2.769.642.879	6.012	32.711.969.747
4	Tahap V	123	983.928.407	593	3.561.250.091			716	4.545.178.498
	Jumlah	2.643	15.149.647.196	16.315	76.327.147.906	457	2.769.642.879	19.415	94.246.437.981

Rincian pembayaran tunggakan insentif tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tahap 85
Tahap Pembayaran Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan Tahun 2022

TAHAP	USULAN		PERSETUJUAN				NILAI DI
	JUMLAH NAKES	NILAI	NO LHR	TANGGAL LHR	JUMLAH NAKES	NILAI YANG DISETUJUI	JUMLAH NAKES
1	1.989	7.882.500.620	PE.12.03/39/D2/03/2023	13 Maret 2023	1920	7.444.822.027	1920
2	10.778	49.610.539.138	PE.12.03/SP-46/D2/03/2023	31 Maret 2023	10767	49.544.467.709	10767
3	6.126	33.237.501.223	PE.12.03/SP-52/D2/03/2023	13 April 2023	6012	32.711.969.747	6012
4	730	4.738.750.104	PE.12.03/LHR-107/D203/3/2023	14 Juni 2023	716	4.545.178.498	716
TOTAL	19.623	95.469.291.085			19.415	94.246.437.981	19.415

Terdapat perbedaan antara nilai Tunggakan Insentif yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 dengan nilai yang disetujui BPKP. Atas selisih nilai tunggakan tersebut dilakukan koreksi pencatatan di modul GLP Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Nilai Tunggakan Insentif Tahun 2022 yang dilakukan koreksi adalah sebagai berikut :

Tabel 86
Rincian Penyajian Tunggakan Insentif TA 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai di Neraca 2022	Nilai yang telah diverifikasi	Selisih
Kewajiban Diestimasi	46.732.145.487	37.257.148.245	9.474.997.242
Belanja Barang Yang Masih Dibayar	56.989.289.736	56.989.289.709	27
Total	103.721.435.223	94.246.437.954	9.474.997.269

7. Tindak Lanjut Temuan Insentif Tenaga Kesehatan

Terdapat temuan pemeriksaan tahun 2021 atas audit Laporan Keuangan tahun 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas pembayaran insentif tenaga kesehatan sebagai berikut :

- a. Kelebihan Pembayaran Insentif Penanganan COVID-19 untuk Peserta PPDS pada Empat Universitas Sebesar Rp5.765.013.330,00 antara lain, FK UI, FK Unsrat, FK UGM dan FK Unair dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 87
Rincian Nilai Temuan pada Universitas

(dalam Rupiah)

No	Nama Universitas	Nilai Temuan
1	Universitas Indonesia	4.704.656.100
2	Universitas Gadjah Mada	236.071.433
3	Universitas Sam Ratulangi	813.571.511
4	Universitas Airlangga	10.714.286
Total		5.765.013.330

Berdasarkan nota konfirmasi penerimaan negara tanggal cetak 6 Desember 2021 sudah diserahkan setoran sejumlah total Rp790.974.098,00. Pada tahun 2022 telah diterima bukti setor pengembalian kas negara sejumlah total Rp472.790.001,00 dan telah dilakukan kompensasi atas pembayaran insentif yang diusulkan Bulan Januari sampai dengan Desember 2022 sejumlah

Rp1.856.944.016,00. Sehingga total kelebihan pembayaran insentif yang telah disetorkan ke Kas Negara adalah sejumlah Rp3.120.708.115,00 dan sisa saldo yang belum disetorkan sejumlah Rp2.644.305.215,00.

- b. Pembayaran Insentif Peserta PIDI Angkatan III, IV Tahun 2019, dan Angkatan I Tahun 2020 Kelebihan Bayar Minimal Sebesar Rp1.326.038.966,00 dan Kelebihan Pembayaran Biaya Bantuan Hidup Peserta Program Internship Dokter Spesialis (PIDI) Sebesar Rp22.050.000,00.

Tindak lanjut atas temuan kelebihan Pembayaran Biaya Bantuan Hidup sudah selesai ditindaklanjuti sebesar Rp22.050.000,00. Sehingga, sisa saldo kelebihan bayar sejumlah Rp1.326.038.966,00.

8. **To Do List Monsakti**

To Do List merupakan menu yang digunakan sebagai informasi, pemberitahuan dan peringatan untuk alur kerja pada SAKTI yang perlu mendapatkan perhatian agar dapat diselesaikan segera pada beberapa Modul Aplikasi SAKTI. Hasil Identifikasi *To Do List* pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 88
Identifikasi *To Do List* Tahun 2023

No	Daftar To Do List Kelompok Modul Pelaporan	Modul	Nilai	Jumlah Baris
1	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB	MAT	6.015.346.610	193

Ketidaksesuaian akun dengan Kode Barang Aset Tetap/ATB terdapat pada enam satker antara lain :

1. Poltekkes Jayapura sebesar Rp532.000.000,00 disebabkan kesalahan penggunaan akun Belanja Modal Tanah untuk

- Penimbunan dan pengaspalan jalan masuk Kampus prodi D3 Kebidanan Biak;
2. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebesar Rp1.973.700.000,00 disebabkan kesalahan pendetailan di Modul Komitmen SAKTI yang mendetailkan Persediaan sebagai Peralatan dan Mesin;
 3. Poltekkes Semarang senilai Rp6.943.050,00 disebabkan kesalahan penggunaan akun belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menghasilkan barang ekstrakomptabel;
 4. Poltekkes Banten senilai Rp190.000.000,00 disebabkan kesalahan pendetailan di Modul Komitmen SAKTI yang mendetailkan Persediaan sebagai Peralatan dan Mesin. Atas kesalahan ini telah dilakukan perbaikan pendetailan di Modul Aset Tetap dan Modul Persediaan dengan mereklas Peralatan dan Mesin ke Persediaan;
 5. Poltekkes Mamuju sebesar Rp199.600.500,00 disebabkan kesalahan penggunaan akun belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menghasilkan Aset Tetap Lainnya berupa Buku; dan
 6. Poltekkes Sorong sebesar Rp5.550.000,00 disebabkan kesalahan penggunaan akun belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menghasilkan barang ekstrakomptabel.

8. Penggunaan Akun COVID

Terdapat Realisasi Belanja menggunakan akun COVID pada Poltekkes Mataram sebesar Rp33.243.541,00 merupakan kesalahan penggunaan akun belanja langganan zoom meeting untuk proses pembelajaran. Atas kesalahan akun tersebut tidak bisa dilakukan revisi karena menggunakan sumber dana PNBPN sedangkan satker tersebut telah ditetapkan sebagai BLU.

9. Selisih Rekonsiliasi Internal

Terdapat selisih Rekonsiliasi Internal per 31 Desember 2023 pada tiga satker dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 89
Selisih Rekonsiliasi Internal

No	Nama Satker	Nama Akun	Nilai Neraca	Nilai Sub Ledger	Selisih
1	Poltekkes Padang	Piutang Lainnya	131.661.264	-	131.661.264
2	Poltekkes Gorontalo	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	4.870.414.510	4.876.414.510	(6.000.000)
3	Poltekkes Kendari	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	67.108.256	73.108.256	(6.000.000)
Total			5.069.184.030	4.949.522.766	119.661.264

1. akun Piutang Lainnya pada Poltekkes Padang sebesar Rp131.661.264,00 karena pencatatan piutang masih menggunakan modul GLP. Hal tersebut disebabkan Poltekkes Padang masih melakukan rekonsiliasi atas nilai Piutang dan Pembayaranannya dengan tim Inspektorat Jenderal.
2. Selisih nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi pada Poltekkes Gorontalo dan Poltekkes Kendari masing-masing sebesar Rp6.000.000,00 merupakan selisih yang timbul karena penyisihan Piutang TP TGR ke Bagian Lancar pada kedua satker tersebut.

10. RPATA BLU

Terdapat dua pekerjaan pada akhir tahun anggaran yang pembayarannya menggunakan sumber dana BLU melalui mekanisme rekening penampungan di Poltekkes Surabaya dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung Direktorat Poltekkes Surabaya

- a. Nilai realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan untuk pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung Direktorat sesuai nilai kontrak sebesar Rp2.826.344.886,00.
- b. Pekerjaan konstruksi renovasi gedung direktorat sudah dilakukan pembayaran ke penyedia menggunakan dana BLU sebesar Rp1.595.785.606,00 dan melalui mekanisme RPATA yang bersumber dari dana BLU sebesar Rp1.230.559.280,00.
- c. Dana untuk pencadangan pembayaran di akhir tahun tersebut disajikan dalam neraca sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp1.230.559.280,00 dan masih tersimpan dalam rekening operasional Poltekkes Surabaya berupa cek yang belum dilakukan pencairan oleh pihak terkait.
- d. Dari realisasi belanja tersebut disajikan seluruhnya dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 baik Laporan Realisasi Anggaran maupun dalam Neraca berupa:
 - 1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU sebesar Rp2.826.344.886,00; dan
 - 2) Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.826.344.886,00 dari pekerjaan konstruksi renovasi gedung direktorat.

Nilai progres pekerjaan konstruksi renovasi gedung direktorat sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.574.037.078,00 atau 91,073% dan sisanya sebesar Rp252.307.808,00 atau 8,927% diselesaikan pada 19 Februari 2024.

Dengan penyajian aset tetap gedung dan bangunan dari pekerjaan konstruksi renovasi gedung Direktorat sebesar nilai kontrak tersebut berdampak pada kelebihan penyajian gedung dan bangunan sebesar Rp2.826.344.886,00 karena

pekerjaan belum selesai. Oleh karena itu tidak memenuhi kriteria sebagai Gedung dan Bangunan, namun sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)..

- e. Terkait dengan realisasi RPATA tersebut seluruhnya disajikan sebagai Dana Pihak Ketiga BLU pada Utang Pihak Ketiga dalam Neraca Keuangan.

2. Pekerjaan Pembangunan *Food Court* untuk mahasiswa dan karyawan Poltekkes Kemenkes Surabaya Tahun 2023.

- a. Nilai realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan untuk pekerjaan Pembangunan *Food Court* untuk Mahasiswa dan Karyawan sesuai nilai kontrak Rp2.321.700.000,00.
- b. Pekerjaan pembangunan *food court* untuk mahasiswa dan karyawan sudah dilakukan pembayaran ke penyedia menggunakan dana BLU sebesar Rp1.467.017.600,00 dan melalui mekanisme RPATA yang bersumber dari dana BLU sebesar Rp854.682.400,00.
- c. Dana untuk pencadangan pembayaran di akhir tahun tersebut disajikan dalam neraca sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp854.682.400,00 dan masih tersimpan dalam rekening operasional Poltekkes Surabaya berupa cek yang belum dilakukan pencairan oleh pihak terkait.
- d. Dari realisasi belanja modal kedua pekerjaan tersebut disajikan seluruhnya dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 baik laporan realisasi anggaran maupun dalam neraca berupa:
 - 1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU sebesar Rp2.321.700.000,00; dan
 - 2) Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.321.700.000,00 dari pekerjaan pembangunan *food court* untuk mahasiswa dan karyawan.

Nilai progres pekerjaan pembangunan *food court* untuk mahasiswa dan karyawan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.209.097.550,00 atau 95,15% dan sisanya sebesar Rp112.602.450,00 atau 4,85% diselesaikan pada 10 Januari 2024. Oleh karena itu terdapat kelebihan penyajian KDP sebesar Rp112.602.450,00 pada Neraca per 31 Desember 2023.

- e. Terkait dengan realisasi RPATA tersebut seluruhnya disajikan sebagai Dana Pihak Ketiga BLU pada Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca Keuangan.

11. Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai *Underlying Asset* Dalam Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Perubahannya Nomor 99/PMK.08/2021, dalam rangka penerbitan SBSN perlu ditetapkan BMN sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dimaksud (*underlying asset* SBSN).

Pengguna Barang tetap dapat menggunakan BMN yang dipergunakan sebagai *underlying asset* penerbitan SBSN sesuai dengan penggunaan awalnya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga. Pengguna Barang tidak dapat melakukan pemindahtanganan dan/atau penghapusan BMN dimaksud selama dipergunakan sebagai *underlying asset* penerbitan SBSN, pemindahtanganan dan/atau penghapusan BMN hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau aset SBSN mengalami rusak berat atau musnah termasuk disebabkan kondisi kahar (*force majeure*).

Daftar penggunaan BMN sebagai *underlying asset* dalam Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara pada tabel 90 dan 91 berikut :

Tabel 90
Daftar Bangunan Gedung sebagai Underlying Asset dalam Penerbitan SBSN

No	Nama Satker	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Kondisi	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Status SBSN	Nomor KMK	Tanggal Penetapan SBSN	Tanggal Jatuh Tempo
1	Poltekkes Surabaya	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik	25 Maret 1980	1.672.612.560	PBS025	S-518/MK.6/2023	20 Juli 2023	15 Mei 2033

Tabel 91
Daftar Tanah sebagai Underlying Asset dalam Penerbitan SBSN

No	Nama Satker	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Kondisi	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Kuantitas (m2)	Status SBSN	Nomor KMK	Tanggal Penetapan SBSN	Tanggal Jatuh Tempo
1	Poltekkes Tanjungkarang	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4	Baik	11 April 1978	20.526.338.000	20.080	SBSN	KMK 100/KM.8/2023, 26 Juni 2023	26 Juni 2023	15 Oktober 2025
2	Poltekkes Denpasar	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik	31 Desember 1984	106.076.250.000	10.500	SBSN	KMK 105/KM.8/2023	26 Juni 2023	15 Maret 2034
3	Poltekkes Mataram	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	Baik	02 Januari 1980	6.774.840.000	2.754	SBSN	KMK 105/KM.8/2023, 26 Juni 2023	26 Juni 2023	15 Maret 2034
4	Poltekkes Palembang	2010104001	Tanah Bangunan kantor Pemerintah	2	Baik	30 Agustus 1985	9.782.370.000	9.020	SBSN	KMK/100/KM.8/2023, 26 Juni 2023	26 Juni 2023	15 Oktober 2025
5	Poltekkes Bandung	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	Baik	2 April 1968	69.079.500.000	3.010	SBSN	KMK. 104/KM.8/2023	26 Juni 2023	15 Mei 2023
6	Poltekkes Bandung	2010101004	Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	1	Baik	24 Maret 1983	45.806.699.000	4.000	SBSN	KMK. 104/KM.8/2023	26 Juni 2023	15 Mei 2023
7	Poltekkes Bandung	2010104002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	1	Baik	05 Desember 1990	65.937.600.000	18.075	SBSN	KMK 98/KM.08/2023	26 Juni 2023	15 Agustus 2023
8	Poltekkes Semarang	2010104002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1	Baik	31 Desember 1990	40.490.419.000	10.068	SBSN	KMK 94/KM.8/2023, 3, 20 Juni 2023	26 Juni 2023	15 Agustus 2025
9	Poltekkes Semarang	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik	10 Desember 1993	140.175.454.000	18.365	SBSN	KMK 108/KM.8/2023, 26 Juni 2023	26 Juni 2023	15 Juli 2026

No	Nama Satker	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Kondisi	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Kuantitas (m2)	Status SBSN	Nomor KMK	Tanggal Penetapan SBSN	Tanggal Jatuh Tempo
10	Poltekkes Banjarmasin	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik	11 Juli 1977	10.992.423.264	76.166	SBSN	KMK 105/KM.8/2023, 26 Juni 2023	26 Juni 2023	15 Maret 2034

12. Permasalahan Hukum atas Tanah BBPK Ciloto

Terdapat permasalahan hukum pada BBPK Ciloto (Tergugat) dengan perorangan bernama Lasmono (Penggugat) atas kepemilikan tanah seluas 500m² di Desa Ciloto propinsi Jawa Barat. Tanah ini masuk ke dalam Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 43/Ciloto atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian Kesehatan, namun oleh Penggugat dianggap masuk ke dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 207/Ciloto atas nama Lasmono. Kasus hukum tersebut telah sampai pada tahap Putusan Peninjauan Kembali 16 November 2018, di mana pihak Kemenkes kalah. Pada tanggal 29 Juli 2020 Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kesehatan telah bersurat ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan perihal Laporan dan Mohon Arahan atas Putusan Peninjauan Kembali No 649 PK/Pdt/2019. Pada tanggal 27 Januari 2023, tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cianjur telah melakukan survei dengan hasil plotting terlampir pada CaLK ini.

